



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR



 www.setda.bogor.go.id

 tu.setda@bogorkab.go.id

 (021) 8754528-875429

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030 dapat diselesaikan.

Renstra Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2025-2030. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor dilakukan dengan melihat hasil pencapaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan direncanakan. Tujuan penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk dapat menjadi pedoman peningkatan kinerja, evaluasi dasar kinerja, profesionalisme pengembangan sumber daya aparatur, serta efisiensi dan efektifitas penganggaran Tahun 2025-2030.

Demikian, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) semoga Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030 ini dapat bermanfaat guna Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor dalam menjalani tugas.

Cibinong, Juli 2025



SEKRETARIS DAERAH,

AJAR ROCHMAT JATNIKA, ST., M.Si

Pembina Utama Muda

197109071999011001

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH.....	14
2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah.....	14
2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.....	14
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah.....	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	33
2.1.4 Kelompok Sasaran Sekretariat Daerah.....	60
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	60
2.2.1 Permasalahan	60
2.2.2 Isu Strategis	62
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Ta. 2025-2029	65
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Ta. 2025-2029.....	67
3.3 Strategi Sekretariat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 ..	69
3.4 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.....	72
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	77
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah	123
BAB V PENUTUP	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Status Pegawai	29
Tabel 2.2	Data Pejabat Struktural/Eselon Sekretariat Daerah	29
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	30
Tabel 2.4	Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Berdasarkan Rincian Kebutuhan	30
Tabel 2.5	Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor	31
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.7	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.8	Kertas Kerja Perumusan Permasalahan Sekretariat Daerah	61
Tabel 2.9	Kertas Kerja Perumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah	64
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	68
Tabel 3.2	Prioritas Pembangunan Sekretariat Daerah Berdasarkan Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030	71
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	75
Tabel 4.1	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah.....	78
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 – 2030	99
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029	119
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah	124
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah..... 28



LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : Tahun 2025

TANGGAL : 2025

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2030**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029, yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Daerah, merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pendukung, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta berperan penting dalam mengoordinasikan dan menyinergikan kebijakan lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah daerah dapat menetapkan arah, prioritas, serta strategi pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, setiap perangkat daerah dituntut untuk menyusun dokumen perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan daerah secara menyeluruh. Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran fungsi-fungsi pemerintahan daerah adalah Sekretariat Daerah, yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan secara umum.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029, yang selanjutnya disebut *Renstra Sekretariat Daerah*, sebagai dokumen yang bersifat operasional, strategis, dan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Renstra ini disusun dalam kerangka waktu

lima tahun, dan menjadi dasar perumusan kebijakan, program, kegiatan, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat umum dan mendukung, sesuai dengan peran dan tanggung jawab Sekretariat Daerah.

Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah (Renstra PD) yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, penyusunan Renstra juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk tata cara penyusunan RPJMD dan Renstra PD. Berdasarkan regulasi tersebut, Renstra Sekretariat Daerah harus mengandung elemen-elemen penting berupa visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja utama, serta pendanaan indikatif.

Secara substantif, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 bertujuan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bogor yaitu Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang. Visi tersebut mencerminkan tekad pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bogor yang memiliki karakteristik unggul, dinamis, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global dan tantangan lokal.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Daerah memiliki kontribusi utama melalui pelaksanaan misi “Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik,” yang diterjemahkan dalam tujuan daerah berupa “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan,” dan sasaran daerah berupa “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Terintegrasi.”

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah dituntut untuk mampu memfasilitasi perumusan kebijakan publik yang berkualitas, mengembangkan sistem tata kelola administrasi pemerintahan yang modern dan akuntabel, serta memastikan keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan antar perangkat daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan dalam Renstra ini juga diarahkan untuk menjawab tantangan kelembagaan, birokrasi, dan tata kelola, seperti digitalisasi administrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan koordinasi lintas

bidang, serta optimalisasi peran sekretariat dalam perencanaan dan pengendalian program lintas urusan pemerintahan.

Adapun arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor guna menyelaraskan strategi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik dengan strategi Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)
3. Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)

Dalam kerangka implementasinya, Renstra ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah setiap tahunnya, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara berkelanjutan hingga tahun 2030. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan adanya konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, serta mendorong pengelolaan pembangunan yang lebih terarah, efisien, dan berbasis hasil (result-based planning).

Lebih jauh, penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, diharapkan dokumen ini mampu menggambarkan kebutuhan riil dan prioritas strategis yang perlu diakomodasi oleh Sekretariat Daerah dalam lima tahun ke depan.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;

1. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta penyiapan data dan informasi.

- 
2. Tahapan penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
 3. Tahapan penetapan Renstra Sekretariat Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai Kepala Perangkat Daerah. Ketertarikan antara Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, diharapkan seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Daerah memiliki pedoman yang jelas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Selain itu, dokumen ini diharapkan mampu menjadi instrumen pengarah yang mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang sebagaimana cita-cita bersama yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum utama yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

- 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
 5. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

- 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
26. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867)
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 361);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)
30. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi
31. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian

Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja
Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025-2030.

Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2025-2029.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2025-2029.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUAPPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2025-2030.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagaimana ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi :

1.1 Latar Belakang

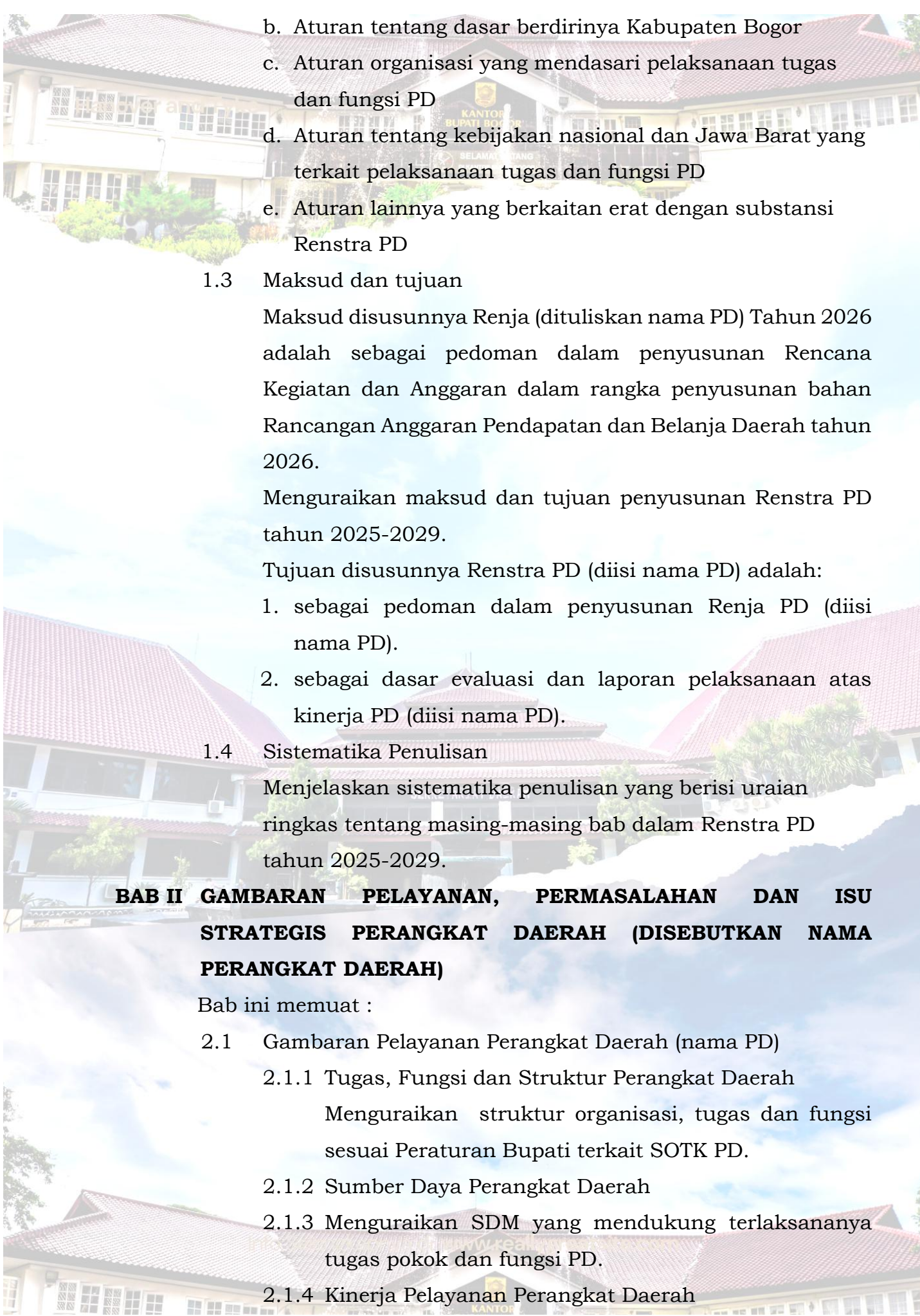
Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD
Keterangan : untuk keseragaman, halaman awal pada Bab I (latar belakang) akan dikoordinasikan oleh Bappedalitbang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Dasar hukum yang dicantumkan :

- a. Aturan tentang perencanaan

- 
- b. Aturan tentang dasar berdirinya Kabupaten Bogor
 - c. Aturan organisasi yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi PD
 - d. Aturan tentang kebijakan nasional dan Jawa Barat yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PD
 - e. Aturan lainnya yang berkaitan erat dengan substansi Renstra PD

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Renja (dituliskan nama PD) Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Renstra PD (diisi nama PD) adalah:

1. sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD (diisi nama PD).
2. sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja PD (diisi nama PD).

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (DISEBUTKAN NAMA PERANGKAT DAERAH)

Bab ini memuat :

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (nama PD)

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan struktur organisasi, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati terkait SOTK PD.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Menguraikan SDM yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi PD.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.5 Menguraikan pencapaian kinerja IKU dan IKK PD sampai dengan tahun 2024, rincian pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta menyebutkan mana yang tercapai, yang melampaui target dengan alasan, serta yang tidak tercapai dengan alasan. Kelompok Sasaran Layanan

2.1.6 Menguraikan pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kewenangan PD, apa saja yang dilayani berdasarkan kelompok sasaran.

Catatan :

1. penggunaan tabel, bagan, diagram maupun gambar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing PD.
2. Dapat ditambahkan dengan informasi terkait :
 - a. mitra kerja yang mendampingi pelayanan PD jika ada
 - b. Kinerja BUMD yang mendukung pencapaian kinerja PD
 - c. Kerjasama dengan daerah lain jika ada

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

2.2.2 Menguraikan permasalahan PD yang masih belum bisa diselesaikan hingga tahun 2024, berupa:

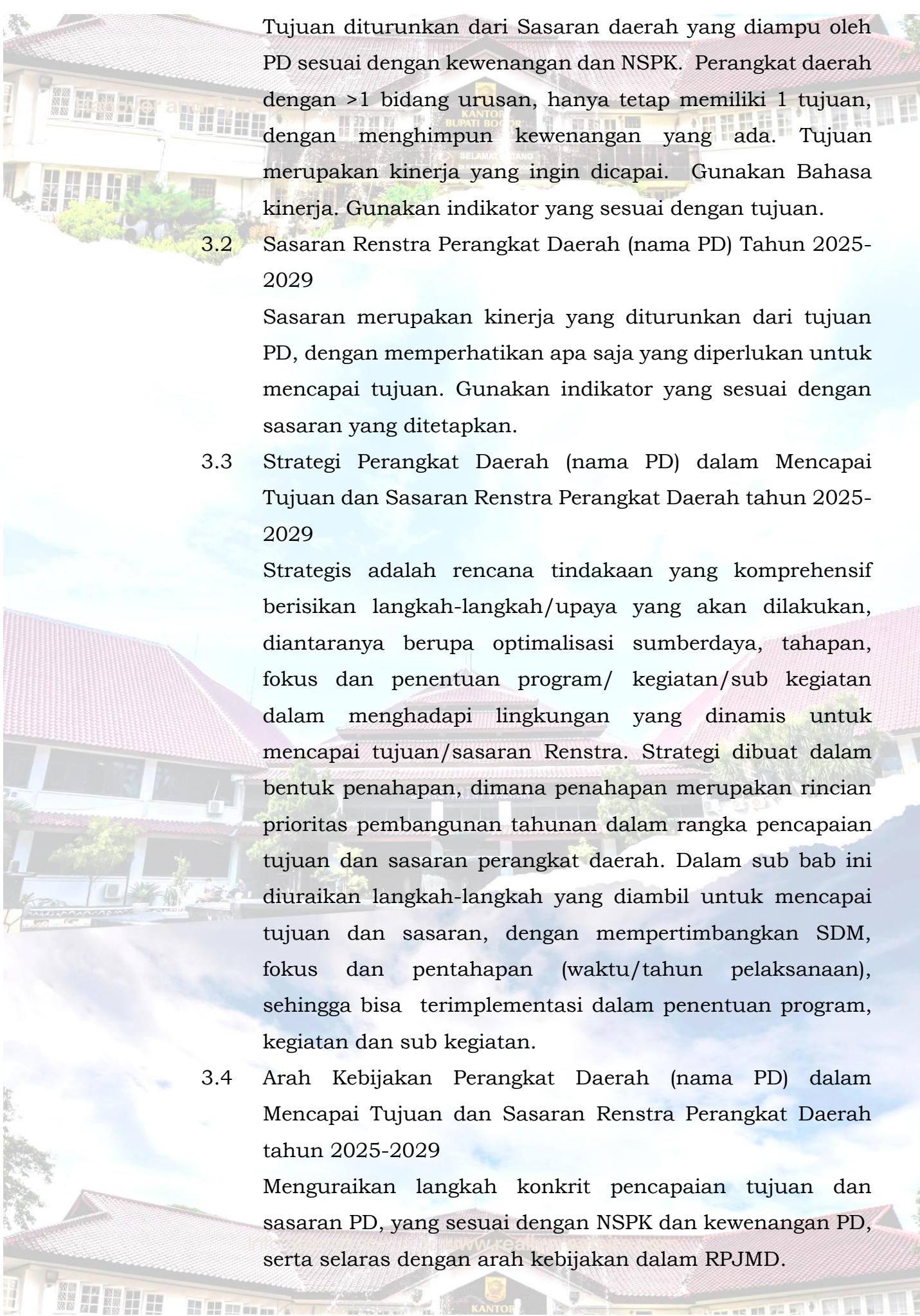
- a. Belum tercapainya target, dan penyebabnya
- b. Permasalahan kekinian yang muncul
- c. Permasalahan belum terlaksananya kewenangan
- d. Permasalahan belum terlaksananya mandatory kebijakan pusat dan provinsi Jabar permasalahan yang terkait dengan hasil evaluasi KLHS permasalahan lainnya yang perlu diuraikan

catatan : Permasalahan yang diuraikan merupakan ikhtisar dari Bab II, dan tidak disajikan dalam bentuk data

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah (nama PD) Tahun 2025-2029



Tujuan diturunkan dari Sasaran daerah yang diampu oleh PD sesuai dengan kewenangan dan NSPK. Perangkat daerah dengan >1 bidang urusan, hanya tetap memiliki 1 tujuan, dengan menghimpun kewenangan yang ada. Tujuan merupakan kinerja yang ingin dicapai. Gunakan Bahasa kinerja. Gunakan indikator yang sesuai dengan tujuan.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah (nama PD) Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan kinerja yang diturunkan dari tujuan PD, dengan memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Gunakan indikator yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3.3 Strategi Perangkat Daerah (nama PD) dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Strategis adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Strategi dibuat dalam bentuk penahapan, dimana penahapan merupakan rincian prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam sub bab ini diuraikan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan SDM, fokus dan pentahapan (waktu/tahun pelaksanaan), sehingga bisa terimplementasi dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah (nama PD) dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran PD, yang sesuai dengan NSPK dan kewenangan PD, serta selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, Menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator, target kinerja serta kebutuhan anggaran tahun rencana (2025-2030). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD, serta digunakan berdasarkan cascading, mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (kinerja)

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

IKU yang disajikan adalah IKU tujuan dan sasaran PD. IKK merupakan kinerja yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja bidang urusan (outcome program, dan output kegiatan). IKK dapat mengakomodir kinerja yang ditetapkan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tindak lanjut substansi Renstra untuk pedoman penjabaran Renja mulai tahun 2025-2030. Bab penutup ditandatangani oleh Bupati Bogor. Lembar ini dikoordinasikan oleh Bappedalitbang untuk penandatangananannya.

LAMPIRAN

Berisi rumus hitung seluruh indikator, yaitu tujuan, sasaran, outcome program, grand output kegiatan dan output sub kegiatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Pembentukan Sekretariat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian, dalam rangka mengimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, secara khusus susunan organisasi Sekretariat Daerah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 tahun 2022, Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi, serta 3 (tiga) orang Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional, serta 12 (dua belas) Bagian, dan 5 (lima) Sub Bagian dan 31 (tiga puluh satu) Sub Koordinator.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat ;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;

- 
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang dibicarakan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai hubungan kerja dengan Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang aspek penataan ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan aspek pertanahan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata aspek kebudayaan, Kecamatan dan Kelurahan serta instansi vertikal di Daerah sesuai tugas dan fungsi Asisten.

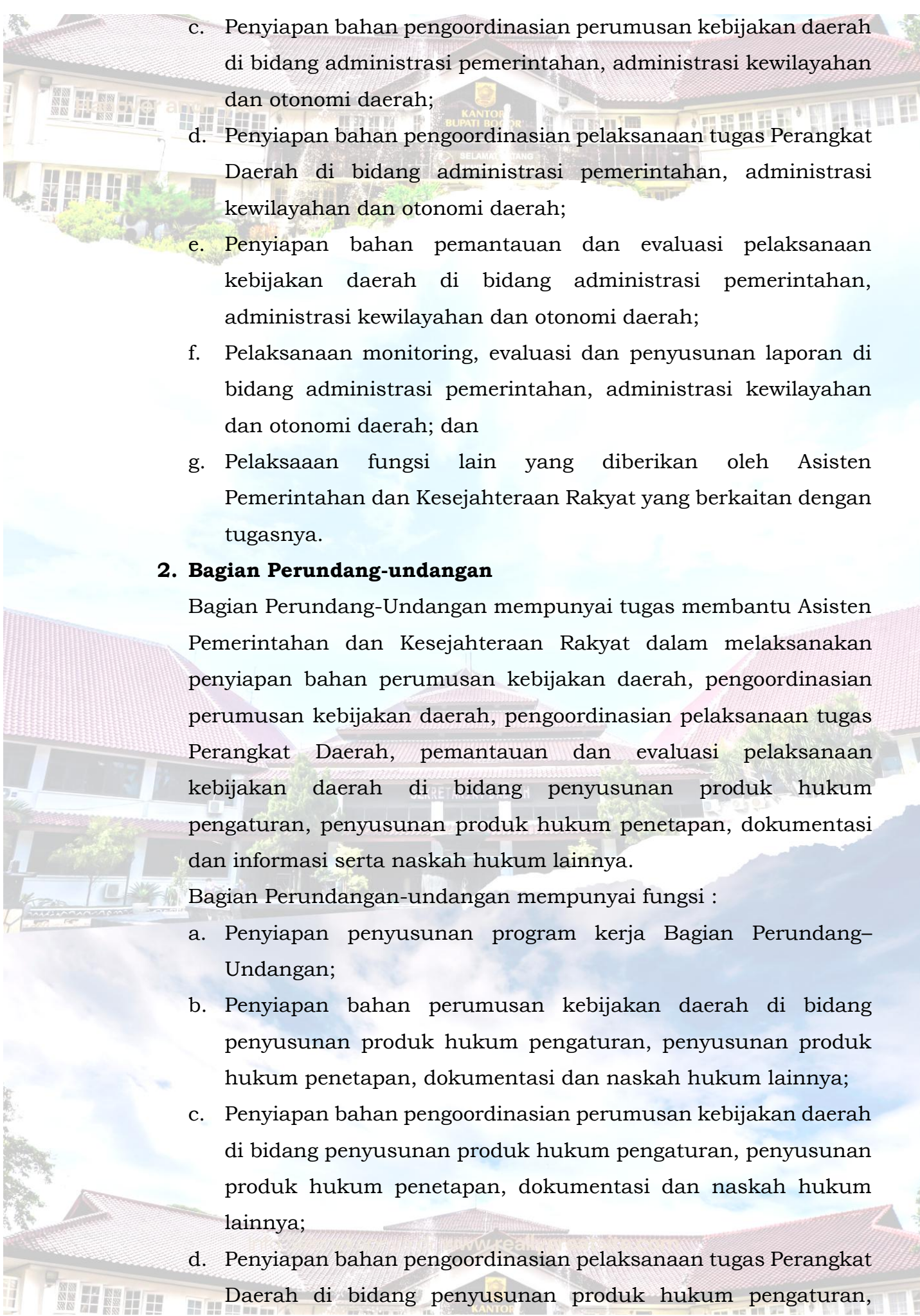
Dalam penyelenggaraan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan program kerja Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

- 
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Perundang-undangan

Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi serta naskah hukum lainnya.

Bagian Perundangan-undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan program kerja Bagian Perundang-Undangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan,

penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;

- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, dokumentasi dan naskah hukum lainnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum

Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama dan bantuan hukum.

Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan program kerja Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama dan bantuan hukum;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama dan bantuan hukum;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. menyiapkan dan menyusun MoU daerah serta perjanjian kerjasama.
- f. penyelenggaraan bantuan hukum pidana, perdata dan tata usaha negara bagi perangkat daerah, pemerintah desa dan aparatur daerah serta masyarakat miskin;
- g. penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemerintah desa dan perangkat daerah;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama dan bantuan hukum;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata aspek pariwisata, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang aspek pekerjaan umum, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan aspek perumahan dan kawasan permukiman, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, serta instansi vertikal di Daerah sesuai tugas dan fungsi Asisten

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1. Bagian Perekonomian

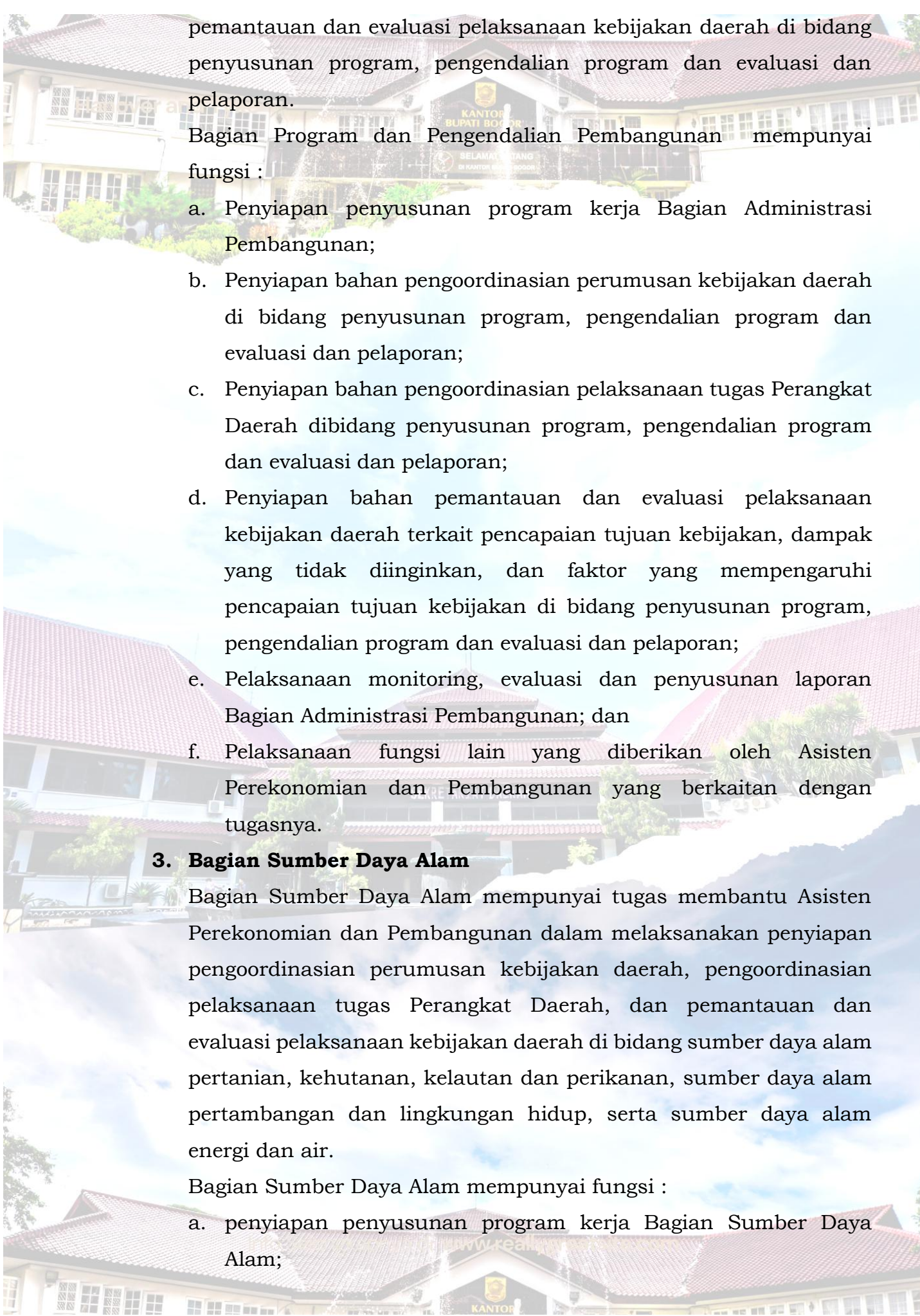
Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan program kerja Bagian Perekonomian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian Perekonomian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,



pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan mempunyai fungsi :

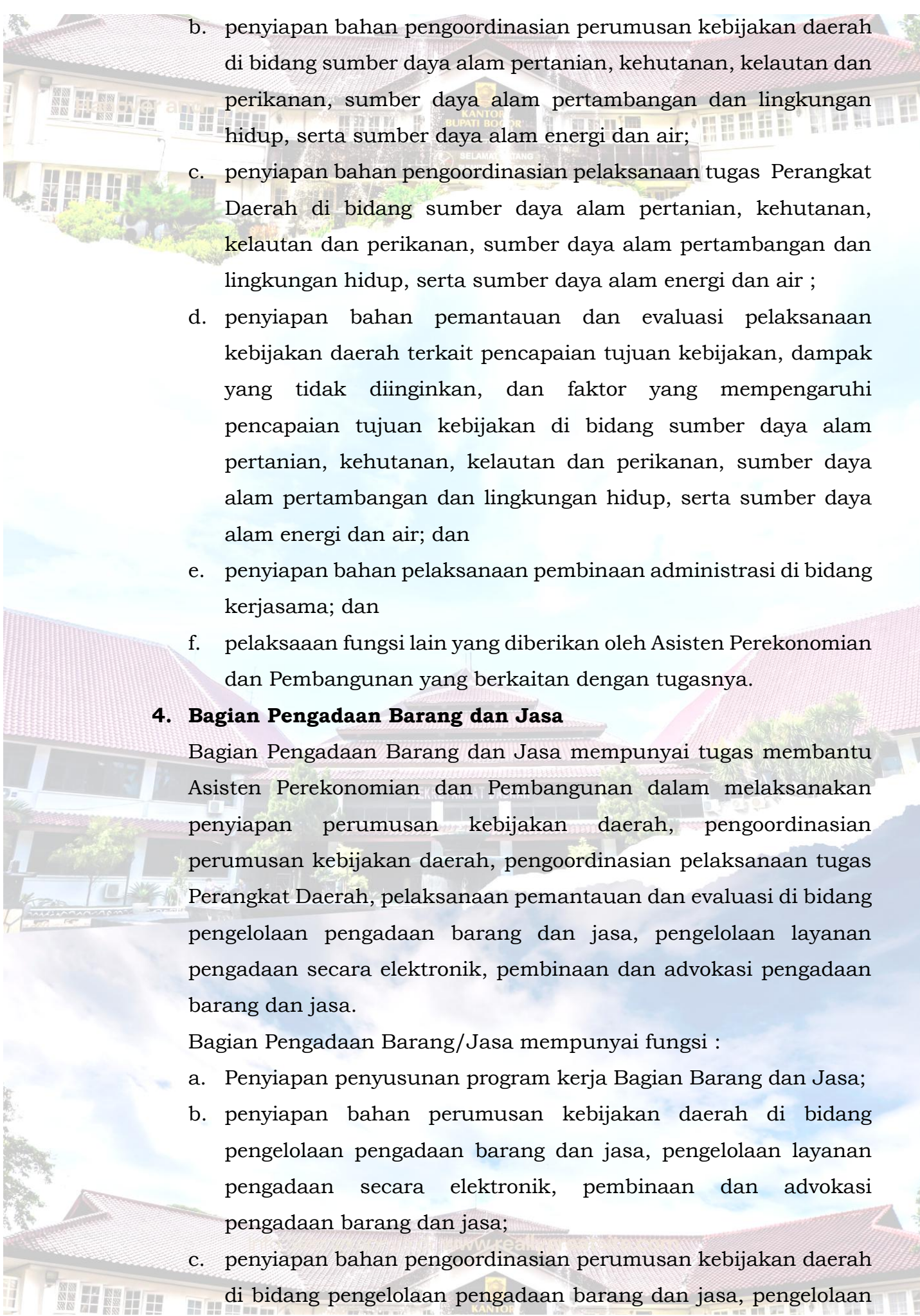
- a. Penyiapan penyusunan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, serta sumber daya alam energi dan air.

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan program kerja Bagian Sumber Daya Alam;

- 
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, serta sumber daya alam energi dan air;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, serta sumber daya alam energi dan air ;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, serta sumber daya alam energi dan air; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan program kerja Bagian Barang dan Jasa;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
2. pelaksanaan' kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
4. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- g. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

Asisten Administrasi Umum mempunyai hubungan kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian, Pengembangan sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta instansi vertikal di Daerah sesuai tugas dan fungsi Asisten

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

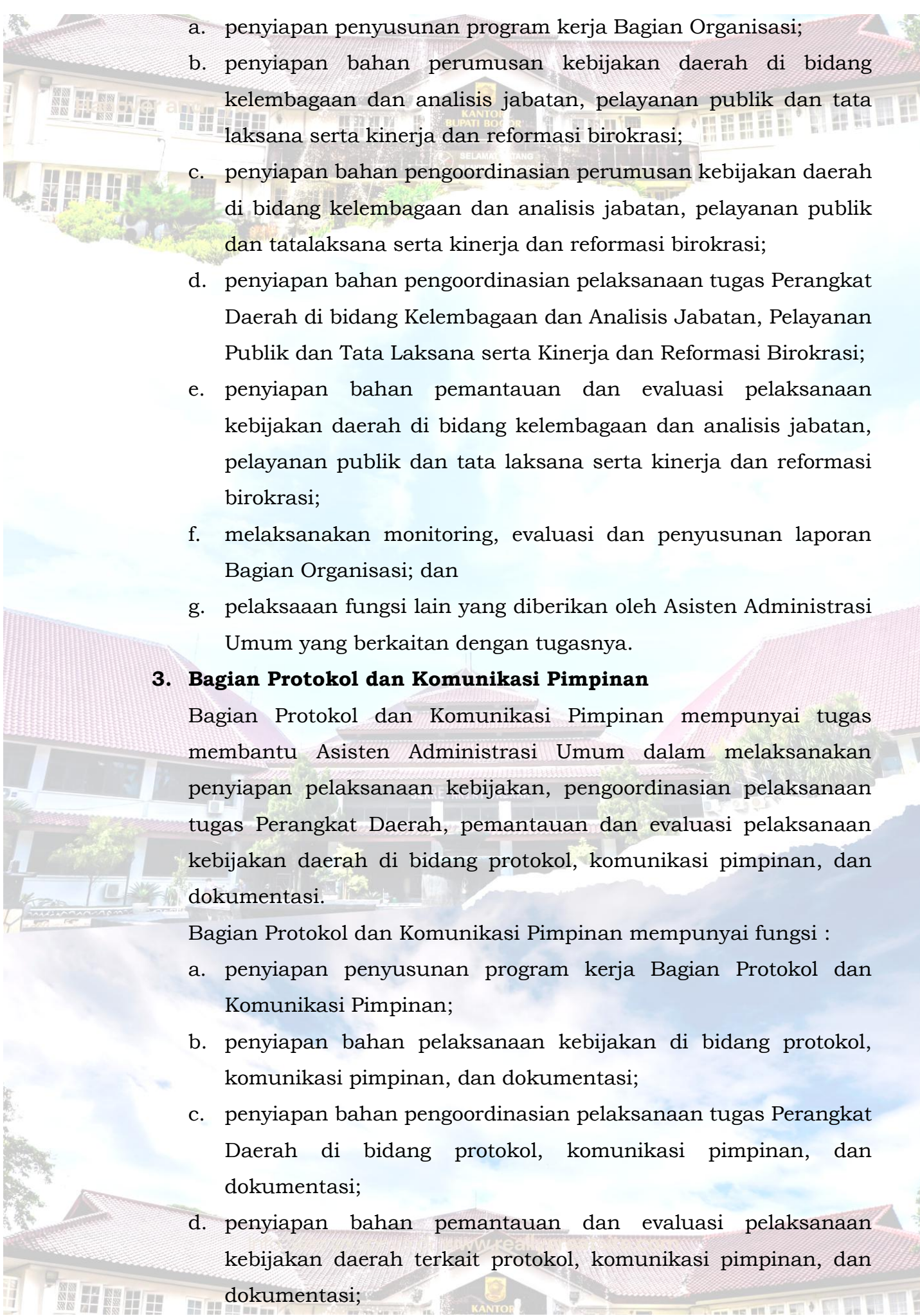
Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan program kerja Bagian Umum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bagian Umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

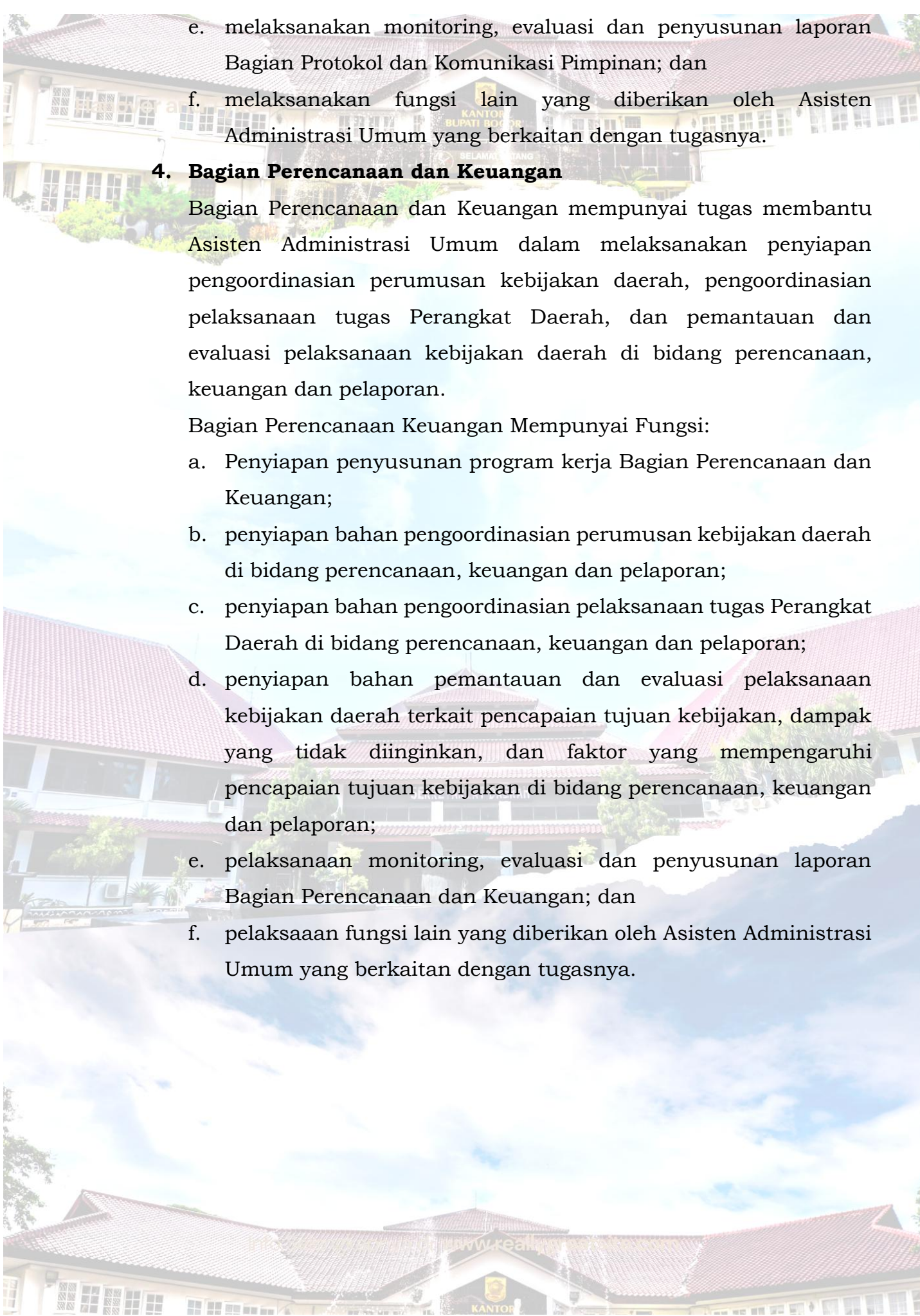
- 
- a. penyiapan penyusunan program kerja Bagian Organisasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bagian Organisasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan program kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

- 
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Bagian Perencanaan Keuangan Mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan program kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

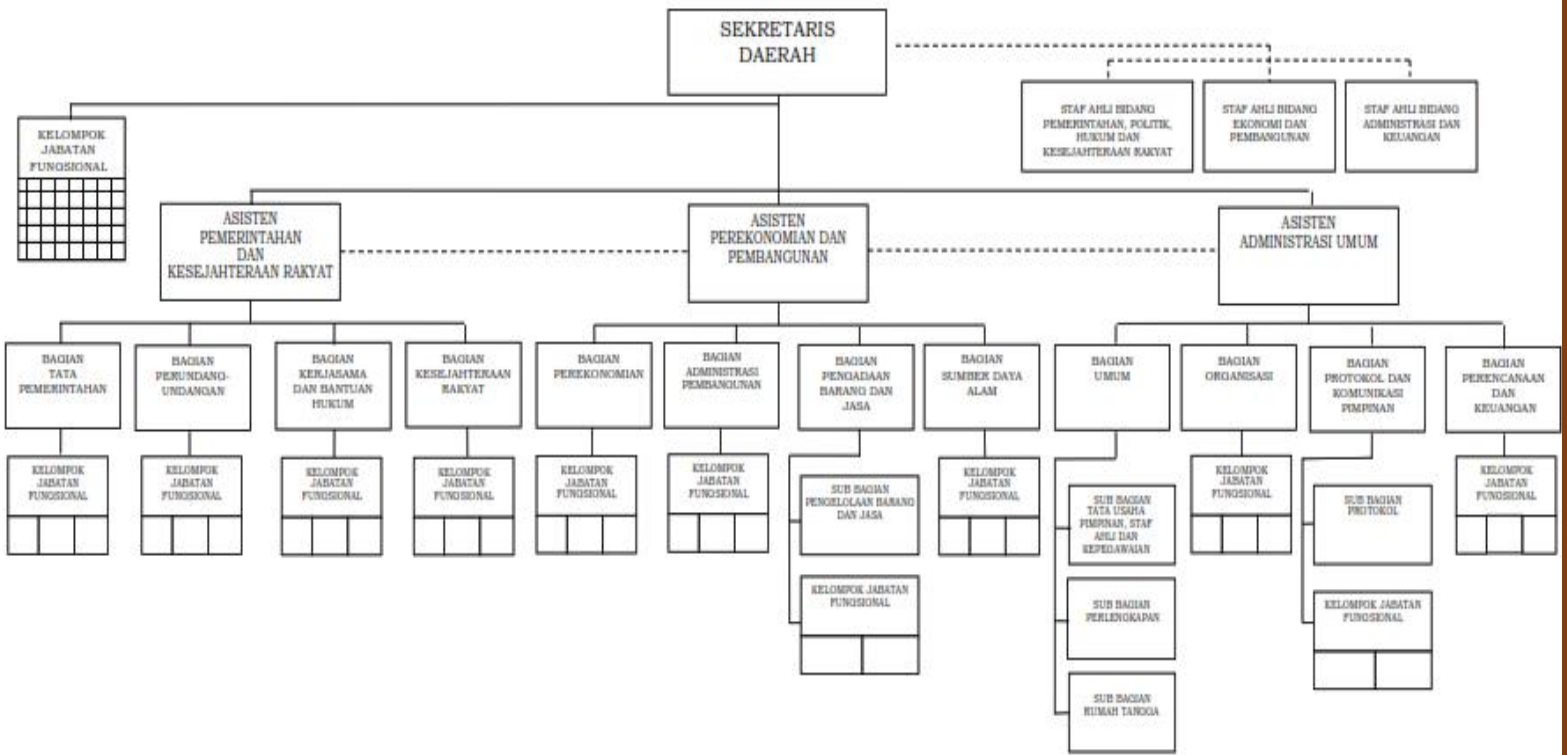
Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
PERIHAL : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Keterangan :

———— : Garis Instrukturif

----- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN



2.1.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Daerah adalah sebagaimana pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
 Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah Pegawai
1	ASN	259
	PNS	242
	PPPK	17
2	Tenaga Honorer	5
3	Tenaga Rekrutmen	94
	Jumlah	358

Tabel 2.2

Data Pejabat Struktural/Eselon Sekretariat Daerah

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II A	1
2	Eselon II B	6
3	Eselon III A	9
	Jumlah	16

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	2
2	S2	54
3	D4/S1	148
4	D3	8
5	SMA	46
6	SMP	1
	Jumlah	259

Tabel 2.4
 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
 Berdasarkan Uraian Jabatan

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	1
2	Staf Ahli	3
3	Asisten	3
4	Kepala Bagian	9
5	Kepala Sub Bagian	5
6	Ketua Tim (Fungsional)	16
7	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1
8	Analisis Kebijakan Utama	1
9	Analisis Hukum Ahli Pertama	4
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2
11	Analisis Pemerintahan Daerah	1
12	Analisis Peraturan Perundang-undangan	1
13	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	1
14	Arsiparis Ahli Pertama	1
15	Arsiparis Terampil	1
16	Operator Layanan Operasional	2
No	Uraian Jabatan	Jumlah
17	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	2
18	Penata Keprotokolan	1
19	Penelaah Teknis Kebijakan	3
20	Pengadministrasian Perkantoran	7
21	Pengadministrasian Umum	1
22	Pengelola Keprotokolan	1
23	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya	2
24	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	13
25	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	30
26	Pengolah Data dan Informasi	1

27	Penyusun Bahan Kebijakan	2
28	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	2
29	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	3
30	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (JF)	2
31	Perencana Ahli Pertama	1
32	Pranata Komputer Ahli Pertama	2
33	Pelaksana	134
Jumlah		259

Selain SDM, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan, pedoman kerja, serta kelembagaan (struktur organisasi) yang tertata merupakan faktor pendukung dalam capaian pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat Daerah. Berikut Rekapitulasi Barang Investasi Kantor.

Tabel 2.5
 Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor

NO	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	KendaraanRoda 4	Unit	Baik	48
2	KendaraanRoda 2	Unit	Baik	31
3	KendaraanRoda 6	Unit	Baik	8
4	Komputer/PC	Unit	Baik	63
5	Printer	Unit	Baik	86
6	MejaKerja	Unit	Baik	149
7	KursiKerja	Unit	Baik	112
8	KursiRapat	Unit	Baik	827
9	MejaRapat	Unit	Baik	87
10	RakBesi/Metal	Buah	Baik	133

11	KursiBesi/Metal	Buah	Baik	27
12	Sofa	Set	Baik	35
13	PenghisapDebu	Unit	Baik	29
14	PemotongRumput	Unit	Baik	12
15	AC	Unit	Baik	147
16	KipasAngin	Buah	Baik	35
17	Lap Top/Notebook	Buah	Baik	37
18	LemariArsip	Buah	Baik	47
19	Proyektor	Buah	Baik	14
20	Handy Talky (HT)	Unit	Baik	47
21	Sound System	Set	Baik	35
22	MesinKetikElektronik	Buah	Baik	15
23	Filling KabinetBesi/Metal	Buah	Baik	121
24	LemariPakaian	Buah	Baik	60
25	Brankas	Buah	Baik	12
26	AlatPenghancurKertas	Buah	Baik	23
27	TV	Unit	Baik	22
28	LemariEs	Unit	Baik	15
29	Dispenser	Buah	Baik	30
30	Mimbar/Podium	Buah	Baik	25
31	Buffet Kayu	Buah	Baik	8
32	Scanner	Unit	Baik	18
33	Jam Elektronik	Buah	Baik	30
34	Lambang Garuda Pancasila	Buah	Baik	36
35	Peralatan Studio Visual lain-lain	Unit	Baik	57
36	Telephone (PABX)	Buah	Baik	84

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) dari mulai inventarisasi kebutuhan barang modal, pencatatan serta distribusi barang sesuai dengan kebutuhan yang belum dilaksanakan secara optimal.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut

1. Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana;
2. Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana;
3. Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana;
4. Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi;
5. Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang terlaksana;
6. Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana;
7. Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana;
8. Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana; dan
9. Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi;

Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

Urusan / Unsur
 Bidang Urusan
 Perangkat Daerah

: Penunjang
 : Sekretariat Daerah
 : Sekretariat Daerah

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	IKU																	
	TUJUAN PD																	
	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Penyusunan Kebijakan yang berkualitas	Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik	%	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A
		Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	68.36	N/A	N/A	N/A	N/A	69.62	N/A	N/A	N/A	N/A	101.84

SASARAN PD																		
		Kontribusi BUMD terhadap penerimaan pembiayaan daerah	%	4.27	N/A	N/A	N/A	N/A	3.49	N/A	N/A	N/A	N/A	81.73	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase rancangan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	23.08	N/A	N/A	N/A	N/A	23.08	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Kualitas penyusunan LPPD	Nilai	3.40	N/A	N/A	N/A	N/A	3.26	N/A	N/A	N/A	N/A	95.88	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase penyelesaian kasus tanah	%	79.07	N/A	N/A	N/A	N/A	79.07	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah DOB	DOB	2.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A

		Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang diterbitkan	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	99.52	N/A	N/A	N/A	N/A	99.52	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani	%	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklanjuti	%	33.33	N/A	N/A	N/A	N/A	33.33	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase kerjasama yang di implementasikan	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari PD	%	98	N/A	N/A	N/A	N/A	97.26	N/A	N/A	N/A	N/A	99.24	N/A	N/A	N/A	N/A

		Rata-rata IKM perangkat daerah diatas 76.61	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A	86.11	N/A	N/A	N/A	N/A	107.63	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A
		Rata-rata nilai AKIP perangkat daerah diatas 60	%	84.38	N/A	N/A	N/A	N/A	71.68	N/A	N/A	N/A	N/A	84.95	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Kajian Strategis yang rekomendatif	%	60.00	N/A	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase lembaga keagamaan yang dilayani	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	90.63	N/A	N/A	N/A	N/A	90.63	N/A	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik	Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	N/A	87.5	88.89	90.28	N/A	N/A	86.11	87.5	97.33	N/A	N/A	98.41	98.43	107.809	N/A

		Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin	N/A	3,45	3.5	3.55	N/A	N/A	N/A	N/A	3.26	N/A	N/A	N/A	N/A	91.83	N/A
		Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	N/A	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	N/A	N/A	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	N/A	N/A	100	100	100	N/A
		Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	90.38	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	110.64
		Persentase Perangkat Daerah dengan ketercapaian kinerjanya kategori tinggi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	66.51	N/A	N/A	N/A	N/A	74.28	N/A	N/A	N/A	N/A	111.68
		Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	14.32	N/A	N/A	N/A	N/A	9.85	N/A	N/A	N/A	N/A	68.78

		Persentase Ketercapaian Indikator RB General dan RB Tematik kewenangan Sekretariat Daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	124.43	N/A	N/A	N/A	N/A	124.43
		Persentasi Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah Kategori Baik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	IKK PD																	
	Program Koordinasi Lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan Kebijakan Lingkup administrasi Pemerintahan	Rumusan kebijakan	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Produk Hukum daerah yang diterbitkan	Produk Hukum	438	N/A	N/A	N/A	N/A	438	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Koordinasi Lingkup Bantuan dan Penyuluhan Hukum	Persentase Permasalahan hukum yang tertangani	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

	Program Koordinasi Lingkup Kesejahteraan Rakyat	Rumusan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat	Rumusan Kebijakan	14	N/A	N/A	N/A	N/A	14	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Kegiatan	10	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Koordinasi Lingkup Perekonomian	Jumlah BUMD Sehat	BUMD	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Koordinasi Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Rumusan Kebijakan Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Rumusan Kebijakan	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Penyusunan Kerjasama Pemerintah	Kerjasama Daerah	Kerjasama Daerah	50	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Selesai Sesuai Permohonan dari Perangkat Daerah	Persen	98.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A

	Program Pengelolaan Rumah tangga dan Protokol Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang berkualitas untuk Seluruh Pegawai	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumusan kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Rumusan Kebijakan	34	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	55.88	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Pengelolaan Ketatausahaan Sekretariat daerah	Index Pelayanan Kesekretariatan	Persen	70.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target	Persen	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Penyusunan Kajian Strategis	Rumusan Kajian Strategis	dokumen	60	N/A	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Program Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rumusan Kajian Strategis	dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi yang mencapai target	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A
		Persentase Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A
		Persentase kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A
		Persentase Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang terlaksana	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A
		Persentase Penyelenggaraan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga yang terlaksana	Persen	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A

		Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A	100
		Persentase Kebijakan di bidang Penunjang Urusan Pemerintahan yang terlaksana	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup penunjang urusan pemerintahan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A
		Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A

		Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A
		Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A
		Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

		Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
		Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dapat sampaikan sebagai berikut antara lain:

1. Tujuan PD dengan indikator Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah target nilai sebesar 63,36 dengan realisasi nilai sebesar 69,62 atau 101,84%.
2. Sasaran PD dengan masing – masing indikator sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik dengan target 90,38 % dengan realisasi sebesar 100%;
 2. Persentase Perangkat Daerah dengan ketercapaian kinerjanya kategori tinggi dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100%;
 3. Nilai Reformasi Birokrasi General target nilai sebesar 66,51 dengan realisasi nilai sebesar 74,28 atau 111,68%.
 4. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik **belum mampu mencapai target**, dengan target nilai sebesar 14,32 dengan realisasi nilai sebesar 9,85 atau 68,78%
 5. Persentase Ketercapaian Indikator RB General dan RB Tematik kewenangan Sekretariat Daerah dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 124,43%;
 6. Persentasi Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah Kategori Baik dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100%;
 7. Terfasilitasnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100%;
 8. Persentase Kebijakan di bidang Penunjang Urusan Pemerintahan yang terlaksana, dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100%;
 9. Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup penunjang urusan pemerintahan dengan Pencapaian Kinerja

kategori tinggi dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100%;

b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

1. Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100%;
2. Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100%;

c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

1. Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100%;
2. Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100%;

Terkait dengan anggaran dan pendanaan Sekretariat Daerah, tabel 2.2, berikut ini adalah Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

Urusan / Unsur : Penunjang
 Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode					Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	03	21			Program Koordinasi Lingkup Administrasi Pemerintahan	1,883,427,000	N/A	N/A	N/A	N/A	1,674,332,335	N/A	N/A	N/A	N/A	88.90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	561,743,000	N/A	N/A	N/A	N/A	508,096,241	N/A	N/A	N/A	N/A	90.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Wilayah	209,385,000	N/A	N/A	N/A	N/A	208,138,229	N/A	N/A	N/A	N/A	99.40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Penyelenggaraan Penataan Wilayah	1,112,299,000	N/A	N/A	N/A	N/A	958,097,865	N/A	N/A	N/A	N/A	86.14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	22			Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	467,415,000	N/A	N/A	N/A	N/A	465,159,723	N/A	N/A	N/A	N/A	99.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	164,522,000	N/A	N/A	N/A	N/A	164,300,900	N/A	N/A	N/A	N/A	99.87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pembentukan Produk Hukum Non Peraturan Daerah	111,777,000	N/A	N/A	N/A	N/A	111,166,000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Kajian dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	191,116,000	N/A	N/A	N/A	N/A	189,692,823	N/A	N/A	N/A	N/A	99.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	23			Program Koordinasi Lingkup Bantuan dan Penyuluhan Hukum	872,022,293	N/A	N/A	N/A	N/A	781,636,100	N/A	N/A	N/A	N/A	89.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Penanganan Bantuan Hukum Litigasi	202,220,000	N/A	N/A	N/A	N/A	179,680,000	N/A	N/A	N/A	N/A	88.85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



			2		Penanganan Bantuan Hukum Non Litigasi	127,330,000	N/A	N/A	N/A	N/A	123,623,700	N/A	N/A	N/A	N/A	97.09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Penyuluhan Hukum Terpadu	513,451,293	N/A	N/A	N/A	N/A	449,311,400	N/A	N/A	N/A	N/A	87.51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			4		Penyelesaian Bantuan Hukum Terpadu	19,211,000	N/A	N/A	N/A	N/A	19,211,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			5		Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bogor	9,810,000	N/A	N/A	N/A	N/A	9,810,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	24			Program Koordinasi Linkup Kesejahteraan Rakyat	484,910,000	N/A	N/A	N/A	N/A	429,740,000	N/A	N/A	N/A	N/A	88.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	235,244,000	N/A	N/A	N/A	N/A	216,444,000	N/A	N/A	N/A	N/A	92.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Kemasyarakatan	249,666,000	N/A	N/A	N/A	N/A	213,296,000	N/A	N/A	N/A	N/A	85.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	25			Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Keleptan di Bidang Keagamaan	3,584,718,500	N/A	N/A	N/A	N/A	3,203,743,000	N/A	N/A	N/A	N/A	89.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bogor	1,413,280,500	N/A	N/A	N/A	N/A	1,335,815,000	N/A	N/A	N/A	N/A	94.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Mental dan Kerohanian	849,846,000	N/A	N/A	N/A	N/A	739,921,000	N/A	N/A	N/A	N/A	87.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Penyelenggaraan Jaringan Aspirasi Masyarakat Linkup Kesgamaan	46,714,000	N/A	N/A	N/A	N/A	30,064,000	N/A	N/A	N/A	N/A	64.36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			4		Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah Kabupaten Bogor	10,540,000	N/A	N/A	N/A	N/A	10,540,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			5		Pengelolaan Data Hibah Sarana Keagamaan	308,375,000	N/A	N/A	N/A	N/A	165,687,500	N/A	N/A	N/A	N/A	53.73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			6		Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid Besar Kabupaten Bogor	955,963,000	N/A	N/A	N/A	N/A	921,715,500	N/A	N/A	N/A	N/A	96.42	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	27			Program Koordinasi Linkup Perekonomian	627,448,911	N/A	N/A	N/A	N/A	569,743,194	N/A	N/A	N/A	N/A	90.80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Badan Usaha Milik Daerah	303,390,000	N/A	N/A	N/A	N/A	258,495,970	N/A	N/A	N/A	N/A	85.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Alam	105,920,000	N/A	N/A	N/A	N/A	101,470,000	N/A	N/A	N/A	N/A	95.80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Penyelenggaraan Dunia Usaha dan Penanaman Modal	218,138,911	N/A	N/A	N/A	N/A	209,777,224	N/A	N/A	N/A	N/A	96.17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	28			Program Koordinasi Linkup Program dan Pengendalian Pembangunan	1,721,817,946	N/A	N/A	N/A	N/A	1,641,881,640	N/A	N/A	N/A	N/A	95.36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



			1		Pengoordinasian Penyelenggaraan Penyusunan Program Pembangunan	628,583,000	N/A	N/A	N/A	N/A	574,059,675	N/A	N/A	N/A	N/A	91.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	733,572,946	N/A	N/A	N/A	N/A	727,524,445	N/A	N/A	N/A	N/A	99.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Penyelenggaraan Pengendalian Pembangunan	359,662,000	N/A	N/A	N/A	N/A	340,297,520	N/A	N/A	N/A	N/A	94.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	29			Program Penyusunan Kerjasama Pemerintah	401,091,250	N/A	N/A	N/A	N/A	340,770,941	N/A	N/A	N/A	N/A	84.96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Penyusunan Kerjasama Pemerintah	118,395,500	N/A	N/A	N/A	N/A	110,549,950	N/A	N/A	N/A	N/A	93.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Penyusunan Kerjasama Non Pemerintah	221,251,000	N/A	N/A	N/A	N/A	176,751,241	N/A	N/A	N/A	N/A	79.89	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Penyusunan Evaluasi Kerjasama	61,444,750	N/A	N/A	N/A	N/A	53,469,750	N/A	N/A	N/A	N/A	87.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	29			Program Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa	11,525,096,800	N/A	N/A	N/A	N/A	11,038,094,840	N/A	N/A	N/A	N/A	95.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengoordinasian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa	5,129,470,800	N/A	N/A	N/A	N/A	5,026,076,011	N/A	N/A	N/A	N/A	97.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1,500,149,000	N/A	N/A	N/A	N/A	1,239,157,091	N/A	N/A	N/A	N/A	82.60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	4,895,477,000	N/A	N/A	N/A	N/A	4,772,861,738	N/A	N/A	N/A	N/A	97.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	15			Program Pengelolaan Rumah tangga dan Protokol Perangkat Daerah	52,514,906,500	N/A	N/A	N/A	N/A	48,301,919,770	N/A	N/A	N/A	N/A	91.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,576,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	3,290,754,322	N/A	N/A	N/A	N/A	92.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,048,530,000	N/A	N/A	N/A	N/A	2,485,380,827	N/A	N/A	N/A	N/A	81.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			4		Penyediaan Makanan dan Minuman	3,452,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	3,390,185,000	N/A	N/A	N/A	N/A	98.21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			15		Penyediaan Sewa Tempat	200,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	192,135,000	N/A	N/A	N/A	N/A	96.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			30		Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	362,425,000	N/A	N/A	N/A	N/A	359,730,000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			32		Pengelolaan Keamanan Kantor	1,644,100,000	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390,527,000	N/A	N/A	N/A	N/A	84.58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			33		Pengelolaan Kebersihan Kantor	3,331,024,000	N/A	N/A	N/A	N/A	3,257,534,600	N/A	N/A	N/A	N/A	97.79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



			63		Pembangunan Penunjang Gedung Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			70		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			71		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	3,494,400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	3,231,394,450	N/A	N/A	N/A	N/A	92.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			72		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6,537,724,500	N/A	N/A	N/A	N/A	6,026,208,240	N/A	N/A	N/A	N/A	92.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			74		Pengadaan Peralatan Kantor	3,687,610,500	N/A	N/A	N/A	N/A	3,393,197,500	N/A	N/A	N/A	N/A	92.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			75		Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,173,855,000	N/A	N/A	N/A	N/A	1,126,289,400	N/A	N/A	N/A	N/A	95.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			76		Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	240,235,500	N/A	N/A	N/A	N/A	232,547,700	N/A	N/A	N/A	N/A	96.80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			90		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	4,239,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	3,787,503,200	N/A	N/A	N/A	N/A	89.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			115		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	6,366,734,000	N/A	N/A	N/A	N/A	6,053,694,800	N/A	N/A	N/A	N/A	95.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			116		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor	2,904,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	2,879,128,800	N/A	N/A	N/A	N/A	99.14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			117		Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	2,515,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	2,179,470,000	N/A	N/A	N/A	N/A	86.66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			118		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional/Jabatan	1,162,258,000	N/A	N/A	N/A	N/A	913,112,316	N/A	N/A	N/A	N/A	78.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			119		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	504,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	470,669,400	N/A	N/A	N/A	N/A	93.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			120		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	215,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	213,595,000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			121		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	1,025,740,000	N/A	N/A	N/A	N/A	918,810,615	N/A	N/A	N/A	N/A	89.58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			141		Penyelenggaraan Protokol	1,766,270,000	N/A	N/A	N/A	N/A	1,542,148,600	N/A	N/A	N/A	N/A	87.31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			143		Pengelolaan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	919,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	870,903,000	N/A	N/A	N/A	N/A	94.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			145		Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	150,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	97,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	64.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	32			Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	438,922,500	N/A	N/A	N/A	N/A	425,724,176	N/A	N/A	N/A	N/A	96.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



			1		Pengoordinasian perumusan penataan kelembagaan perangkat daerah	123,453,000	N/A	N/A	N/A	N/A	115,719,495	N/A	N/A	N/A	N/A	93.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengoordinasian perumusan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	148,088,000	N/A	N/A	N/A	N/A	147,694,055	N/A	N/A	N/A	N/A	99.73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengoordinasian Penyelenggaraan ANJAB dan ABK	167,381,500	N/A	N/A	N/A	N/A	162,310,626	N/A	N/A	N/A	N/A	96.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	16			Program Pengelolaan Ketatausahaan Sekretariat daerah	3,366,304,750	N/A	N/A	N/A	N/A	3,176,758,610	N/A	N/A	N/A	N/A	94.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	472,683,000	N/A	N/A	N/A	N/A	450,262,000	N/A	N/A	N/A	N/A	95.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	1,662,117,750	N/A	N/A	N/A	N/A	1,603,323,300	N/A	N/A	N/A	N/A	96.46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			10		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	164,865,000	N/A	N/A	N/A	N/A	163,650,800	N/A	N/A	N/A	N/A	99.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			15		Penyusunan Perencanaan Anggaran	320,793,000	N/A	N/A	N/A	N/A	308,408,724	N/A	N/A	N/A	N/A	96.14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			20		Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	137,179,000	N/A	N/A	N/A	N/A	116,472,286	N/A	N/A	N/A	N/A	84.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			25		Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	265,792,000	N/A	N/A	N/A	N/A	233,445,000	N/A	N/A	N/A	N/A	87.83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			30		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	72,525,000	N/A	N/A	N/A	N/A	64,526,500	N/A	N/A	N/A	N/A	88.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			35		Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	36,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	4,250,000	N/A	N/A	N/A	N/A	11.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			40		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	108,850,000	N/A	N/A	N/A	N/A	106,920,000	N/A	N/A	N/A	N/A	98.23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			100		Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	125,500,000	N/A	N/A	N/A	N/A	125,500,000	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	17			Program Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	3,106,197,000	N/A	N/A	N/A	N/A	2,950,675,096	N/A	N/A	N/A	N/A	94.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	2,044,722,000	N/A	N/A	N/A	N/A	2,043,159,121	N/A	N/A	N/A	N/A	99.92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			5		Penyusunan Pelaporan Keuangan	94,910,000	N/A	N/A	N/A	N/A	93,783,125	N/A	N/A	N/A	N/A	98.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			10		Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	544,263,000	N/A	N/A	N/A	N/A	528,546,850	N/A	N/A	N/A	N/A	97.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			15		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	422,302,000	N/A	N/A	N/A	N/A	285,186,000	N/A	N/A	N/A	N/A	67.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



40	03	26			Program Penyusunan Kajian Strategis	418,552,000	N/A	N/A	N/A	N/A	406,938,742	N/A	N/A	N/A	N/A	97.23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Penyusunan Kajian Strategis	418,552,000	N/A	N/A	N/A	N/A	406,938,742	N/A	N/A	N/A	N/A	97.23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	03	33			Program Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1,436,300,000	N/A	N/A	N/A	N/A	1,414,249,482	N/A	N/A	N/A	N/A	98.46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			1		Pengordinasian Penyusunan Akuntabilitas Kinerja daerah	316,490,000	N/A	N/A	N/A	N/A	313,059,982	N/A	N/A	N/A	N/A	98.92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2		Pengordinasian Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	796,725,000	N/A	N/A	N/A	N/A	781,906,500	N/A	N/A	N/A	N/A	98.14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			3		Pengordinasian Pengelolaan Statistik	323,085,000	N/A	N/A	N/A	N/A	319,283,000	N/A	N/A	N/A	N/A	98.82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	107,529,865,112	104,518,333,767	95,221,764,781	107,584,902,348	N/A	100,288,259,099	97,441,014,927	91,945,478,588	104,976,581,502	N/A	93.27	93.23	96.56	97.58	0.01	1.15
4	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	578,887,986	456,894,304	349,286,627	507,407,621	N/A	481,449,754	428,456,965	335,115,424	458,566,752	N/A	83.17	93.78	95.94	90.37	(3.24)	(1.21)
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	162,604,518	161,618,586	159,434,469	132,102,818	N/A	132,447,442	143,456,911	148,632,016	127,611,368	N/A	81.45	88.76	93.22	96.60	(5.06)	(0.93)
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	118,906,350	71,970,950	22,591,150	91,186,794	N/A	108,668,600	71,910,950	22,506,150	61,426,800	N/A	91.39	99.92	99.62	67.36	(6.42)	(13.29)
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	36,493,250	31,104,600	20,498,525	31,759,450	N/A	16,779,900	30,698,100	20,498,525	29,588,300	N/A	45.98	98.69	100.00	93.16	(3.41)	15.23
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	N/A	34,043,100	28,660,950	20,552,400	49,544,625	N/A	31,721,000	28,472,000	20,552,400	46,975,000	N/A	93.18	99.34	100.00	94.81	9.84	10.31
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	N/A	24,455,000	30,120,200	21,574,050	33,987,775	N/A	23,140,000	29,220,650	21,534,050	31,378,500	N/A	94.62	97.01	99.81	92.32	8.58	7.91
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	122,296,718	85,601,268	70,163,708	107,051,284	N/A	94,493,912	78,266,604	66,919,958	103,164,284	N/A	77.27	91.43	95.38	96.37	(3.27)	2.22
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	80,089,050	47,817,750	34,472,325	61,774,875	N/A	74,198,900	46,431,750	34,472,325	58,422,500	N/A	92.65	97.10	100.00	94.57	(6.28)	-5.80
4	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	53,796,725,109	53,799,436,537	55,187,557,574	55,358,481,791	N/A	49,225,808,544	52,774,298,110	54,148,044,090	55,071,722,380	N/A	91.50	98.09	98.12	99.48	0.72	2.85
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	53,161,824,133	52,960,149,161	54,775,197,752	54,884,385,296	N/A	48,714,159,214	52,089,210,842	53,748,047,540	54,620,244,010	N/A	91.63	98.36	98.12	99.52	0.80	2.90
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	222,812,204	568,718,054	154,790,784	245,053,268	N/A	217,006,226	464,691,164	150,688,025	242,065,318	N/A	97.39	81.71	97.35	98.78	2.41	2.77
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	120,808,786	102,288,636	89,211,683	56,963,534	N/A	78,133,858	66,961,598	88,903,458	54,829,384	N/A	64.68	65.46	99.65	96.25	(17.13)	-8.47

				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	128,008,486	101,957,786	105,630,670	87,784,993	N/A	82,517,946	89,773,106	98,050,332	83,323,268	N/A	64.46	88.05	92.82	94.92	(9.00)	0.24
				06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	N/A	30,040,000	N/A	N/A	N/A	N/A	19,370,400	N/A	N/A	N/A	N/A	64.48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	77,521,250	39,619,850	43,544,600	36,645,300	N/A	64,350,400	38,551,350	43,252,650	35,334,800	N/A	83.01	97.30	99.33	96.42	(17.08)	-13.92
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	55,710,250	26,703,050	19,182,085	47,649,400	N/A	50,270,500	25,110,050	19,102,085	35,925,600	N/A	90.24	94.03	99.58	75.40	(3.83)	-8.06
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	N/A	162,595,150	14,479,470	24,406,680	21,397,581	N/A	154,152,000	12,823,700	20,880,500	18,539,100	N/A	94.81	88.56	85.55	86.64	(39.77)	-41.11
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	37,709,150	3,335,970	1,385,280	1,384,947	N/A	34,434,200	3,032,700	888,000	1,247,700	N/A	91.32	90.91	64.10	90.09	(56.22)	-56.37
				05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	37,386,000	2,021,250	5,647,680	2,647,683	N/A	34,967,800	1,835,500	5,088,000	2,385,300	N/A	93.53	90.81	90.09	90.09	(48.41)	-48.89
				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	87,500,000	9,122,250	17,373,720	17,364,951	N/A	84,750,000	7,955,500	14,904,500	14,906,100	N/A	96.86	87.21	85.79	85.84	(33.26)	-35.24
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	260,622,622	548,718,572	262,714,137	1,879,705,531	N/A	248,475,060	506,717,350	256,760,232	1,834,389,131	N/A	95.34	92.35	97.73	97.59	63.88	64.84
				01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	28,950,050	184,530,450	23,361,605	377,108,115	N/A	28,427,500	168,425,350	22,968,500	353,824,750	N/A	98.19	91.27	98.32	93.83	89.98	87.83
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	182,315,372	218,473,422	183,032,382	194,250,261	N/A	170,691,560	195,810,300	178,135,932	183,106,083	N/A	93.62	89.63	97.32	94.26	1.60	1.77
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	N/A	40,714,700	56,320,150	293,347,155	N/A	N/A	38,873,700	55,655,800	288,335,850	N/A	N/A	95.48	98.82	98.29	N/A	N/A
				05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	49,357,200	105,000,000	N/A	1,015,000,000	N/A	49,356,000	103,608,000	N/A	1,009,122,448	N/A	100.00	98.67	N/A	99.42	112.95	112.64
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	18,157,807,840	20,030,382,094	14,373,835,495	17,552,779,088	N/A	17,671,190,783	18,398,675,917	14,029,169,103	16,869,774,917	N/A	97.32	91.85	97.60	96.11	(0.84)	-1.15
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	133,705,000	233,998,224	223,070,697	295,234,527	N/A	132,472,800	233,338,910	221,904,250	294,675,250	N/A	99.08	99.72	99.48	99.81	21.90	22.12

				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	8,862,339,140	8,876,449,220	4,121,081,766	5,710,375,736	N/A	8,480,036,608	7,574,440,457	3,946,779,214	5,528,122,918	N/A	95.69	85.33	95.77	96.81	(10.41)	-10.14
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	3,805,270,000	4,111,377,350	2,991,100,000	3,566,415,500	N/A	3,783,915,000	3,813,141,500	2,941,360,000	3,125,704,400	N/A	99.44	92.75	98.34	87.64	(1.61)	-4.67
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	466,618,000	740,676,150	361,423,992	313,159,296	N/A	461,783,650	722,838,250	350,912,900	283,605,250	N/A	98.96	97.59	97.09	90.56	(9.49)	-11.47
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				08	Fasilitas Kunjungan Tamu	N/A	2,169,500,000	3,309,050,000	3,874,295,000	5,633,901,904	N/A	2,169,497,500	3,303,481,000	3,871,420,500	5,631,722,125	N/A	100.00	99.83	99.93	99.96	26.94	26.93
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	2,641,479,000	2,593,819,400	2,458,609,940	1,760,940,000	N/A	2,570,741,225	2,589,540,600	2,364,166,239	1,737,111,599	N/A	97.32	99.84	96.16	98.65	(9.64)	-9.33
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	78,896,700	165,011,750	344,254,100	272,752,125	N/A	72,744,000	161,895,200	332,626,000	268,833,375	N/A	92.20	98.11	96.62	98.56	36.36	38.65
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	1,112,404,000	4,846,645,913	N/A	1,455,860,980	N/A	904,400,000	3,548,132,000	N/A	1,375,700,000	N/A	81.30	73.21	#VALUE!	94.49	6.96	11.06
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	1,112,404,000	N/A	N/A	1,455,860,980.00	N/A	904,400,000	N/A	N/A	1,375,700,000	N/A	81.30	N/A	N/A	94.49	6.96	11.06
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	2,075,142,494.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,009,452,000	N/A	N/A	N/A	N/A	48.64	N/A	N/A	N/A	N/A
				10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	1,974,003,419.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,946,710,000	N/A	N/A	N/A	N/A	98.62	N/A	N/A	N/A	N/A
				11	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	797,500,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	591,970,000	N/A	N/A	N/A	N/A	74.23	N/A	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	9,850,151,768	10,505,163,320	10,062,371,458	11,075,816,990	N/A	9,126,851,526	9,577,366,146	9,433,229,114	10,607,264,174	N/A	92.66	91.17	93.75	95.77	2.98	3.83
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	1,270,804,976	1,079,138,098	1,201,492,410	1,885,511,019	N/A	1,182,897,096	963,545,048	1,154,261,362	1,862,530,790	N/A	93.08	89.29	96.07	98.78	10.37	12.02
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	4,150,707,680	3,891,218,412	3,959,636,372	4,311,300,332	N/A	3,791,527,838	3,547,719,878	3,777,275,938	3,998,154,908	N/A	91.35	91.17	95.39	92.74	0.95	1.34
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	639,706,102	1,640,765,000	1,148,389,957	1,434,934,876	N/A	634,615,000	1,525,301,200	1,099,252,050	1,380,151,034	N/A	99.20	92.96	95.72	96.18	22.38	21.44
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	3,788,933,010	3,894,041,810	3,752,852,719	3,444,070,763	N/A	3,517,811,592	3,540,800,020	3,402,439,764	3,366,427,442	N/A	92.84	90.93	90.66	97.75	(2.36)	-1.09

4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	14,068,988,893	3,739,314,481	4,225,913,490	7,343,547,446	N/A	13,381,570,178	3,385,522,742	3,958,354,695	6,839,521,366	N/A	95.11	90.54	93.67	93.14	(15.00)	-15.45
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	208,869,600	488,119,600	389,250,000	465,910,000	N/A	166,241,558	255,354,492	263,448,440	296,303,463	N/A	79.59	52.31	67.68	63.60	22.21	15.54
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	373,382,500	701,382,500	727,700,000	917,700,000	N/A	344,627,020	612,721,050	615,824,255	657,538,503	N/A	92.30	87.36	84.63	71.65	25.21	17.53
				05	Pemeliharaan Mebel	N/A	194,997,050	409,850,000	N/A	114,996,000	N/A	189,495,500	398,611,200	N/A	110,889,000	N/A	97.18	97.26	N/A	96.43	(12.37)	-12.54
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	13,291,739,743	2,139,962,381	3,108,963,490	5,844,941,446	N/A	12,681,206,100	2,118,836,000	3,079,082,000	5,774,790,400	N/A	95.41	99.01	99.04	98.80	(18.57)	-17.85
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	5,373,123,626	6,373,155,432	4,804,964,420	6,378,594,433	N/A	5,327,590,344	4,822,651,994	4,183,636,526	6,007,366,726	N/A	99.15	75.67	87.07	94.18	4.38	3.05
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	213,539,594	1,229,698,536	1,229,698,536	1,032,182,416	N/A	171,156,312	840,530,906	613,270,642	756,307,300	N/A	80.15	68.35	49.87	73.27	48.28	44.99
				02	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	222,600,000	206,472,864	178,500,000	272,706,000	N/A	219,450,000	197,100,000	173,600,000	267,050,000	N/A	98.58	95.46	97.25	97.93	5.21	5.03
				03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	4,936,984,032	4,936,984,032	3,396,765,884	5,073,706,017	N/A	4,936,984,032	3,785,021,088	3,396,765,884	4,984,009,426	N/A	100.00	76.67	100.00	98.23	0.69	0.24
4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	N/A	1,078,494,450	1,126,172,950	868,994,750	1,264,553,200	N/A	1,026,134,000	1,012,627,400	708,270,700	1,260,387,425	N/A	95.15	89.92	81.50	99.67	4.06	5.27
				01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	N/A	636,194,150	392,083,000	237,852,600	999,227,500	N/A	611,544,500	285,441,200	236,789,400	996,721,225	N/A	96.13	72.80	99.55	99.75	11.95	12.99
				02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	N/A	362,300,300	359,384,950	258,530,350	N/A	N/A	335,477,000	356,756,200	248,385,300	N/A	N/A	92.60	99.27	96.08	N/A	N/A	N/A
				03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	N/A	80,000,000	374,705,000	372,611,800	265,325,700	N/A	79,112,500	370,430,000	223,096,000	263,666,200	N/A	98.89	98.86	59.87	99.37	34.95	35.11
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	N/A	422,401,250	642,403,150	1,204,504,375	1,504,482,059	N/A	402,934,850	633,882,150	1,176,937,250	1,438,846,919	N/A	95.39	98.67	97.71	95.64	37.38	37.47
				01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	N/A	125,119,050	239,741,500	437,489,000	351,882,050	N/A	120,198,050	236,413,500	431,671,250	325,559,850	N/A	96.07	98.61	98.67	92.52	29.50	28.29
						N/A	N/A	N/A	N/A	134,695,625	N/A	N/A	N/A	N/A	133,952,175	N/A	N/A	N/A	N/A	99.45	N/A	N/A
				02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	N/A	34,540,450	70,332,100	110,683,300	447,683,100	N/A	34,530,200	70,095,100	105,818,800	421,853,600	N/A	99.97	99.66	95.61	94.23	89.74	86.96



				03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	N/A	78,319,000	100,246,950	403,098,150	187,240,300	N/A	74,369,600	99,046,950	393,082,450	182,194,050	N/A	94.96	98.80	97.52	97.30	24.35	25.11
				04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	N/A	55,624,300	161,256,150	161,515,600	382,980,984	N/A	53,924,650	157,500,150	159,159,650	375,287,244	N/A	96.94	97.67	98.54	97.99	61.99	62.42
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	N/A	128,798,450	70,826,450	91,718,325	N/A	N/A	119,912,350	70,826,450	87,205,100	N/A	N/A	93.10	100.00	95.08	N/A	N/A	N/A
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	N/A	2,667,662,418	2,435,567,544	3,857,215,775	3,242,275,628	N/A	2,337,702,060	2,339,860,453	3,695,080,954	3,194,502,612	N/A	87.63	96.07	95.80	98.53	5.00	8.12
				01	Fasilitasi Keprotokolan	N/A	1,743,488,752	1,626,881,128	2,325,368,000	2,407,278,708	N/A	1,479,045,616	1,554,059,709	2,255,567,819	2,379,982,318	N/A	84.83	95.52	97.00	98.87	8.40	12.63
				02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	N/A	417,593,290	369,315,690	363,464,665	353,854,920	N/A	381,188,860	352,738,936	351,811,740	343,403,472	N/A	91.28	95.51	96.79	97.05	(4.06)	-2.58
						N/A	N/A	N/A	N/A	481,142,000	N/A	N/A	N/A	N/A	471,116,822	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	N/A	506,580,376	439,370,726	1,168,383,110		N/A	477,467,584	433,061,808	1,087,701,395		N/A	94.25	98.56	93.09	#DIV/0!	(100.00)	-100.00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	N/A	34,562,378,964	33,068,816,906	32,172,528,436	33,301,523,622	N/A	30,213,891,541	30,950,682,140	31,521,130,587	31,947,650,721	N/A	87.42	93.59	97.98	95.93	(0.92)	1.40
4	01	02	2.01		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	N/A	1,162,470,806	2,439,603,142	1,637,026,454	2,850,913,476	N/A	1,153,955,627	2,378,511,222	1,613,763,797	2,827,350,177	N/A	99.27	97.50	98.58	99.17	25.14	25.11
				01	Penataan Administrasi Pemerintahan	N/A	381,349,488	1,299,075,606	791,689,558	1,171,783,884	N/A	378,341,177	1,292,367,883	775,640,691	1,165,720,061	N/A	99.21	99.48	97.97	99.48	32.40	32.49
				02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	N/A	266,753,268	722,782,918	503,259,663	825,271,083	N/A	264,224,000	697,783,320	498,715,758	813,693,982	N/A	99.05	96.54	99.10	98.60	32.62	32.47
				03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	N/A	514,368,050	417,744,618	342,077,233	853,858,509	N/A	511,390,450	388,360,019	339,407,348	847,936,134	N/A	99.42	92.97	99.22	99.31	13.51	13.48
4	01	02	2.02		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	N/A	32,414,673,472	29,052,215,428	28,771,082,966	26,979,686,603	N/A	28,159,421,873	27,074,652,220	28,180,801,956	25,757,906,487	N/A	86.87	93.19	97.95	95.47	(4.48)	-2.20
				01	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	N/A	1,347,791,150	1,814,820,350	2,452,237,299	10,316,938,057	N/A	1,132,909,850	1,754,752,250	2,431,304,899	9,704,535,496	N/A	84.06	96.69	99.15	94.06	66.33	71.08
				02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	N/A	10,045,163,718	10,626,708,618	12,977,541,733	14,866,021,933	N/A	9,954,928,512	10,575,127,226	12,897,703,833	14,296,827,809	N/A	99.10	99.51	99.38	96.17	10.30	9.47
				03	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	N/A	21,021,718,604	16,610,686,460	13,341,303,934	1,796,726,613	N/A	17,071,583,511	14,744,772,744	12,851,793,224	1,756,543,182	N/A	81.21	88.77	96.33	97.76	(45.93)	-43.36
4	01	02	2.03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	N/A	859,276,986	1,346,156,086	1,600,897,591	3,141,095,893	N/A	828,793,491	1,311,207,668	1,572,812,330	3,069,443,557	N/A	96.45	97.40	98.25	97.72	38.27	38.72
				01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	N/A	372,326,218	698,008,968	746,726,883	1,494,311,184	N/A	357,255,527	670,227,646	728,687,691	1,467,926,334	N/A	95.95	96.02	97.58	98.23	41.54	42.37

						N/A	N/A	N/A	N/A	968,740,275	N/A	N/A	N/A	N/A	933,619,886	N/A	N/A	N/A	N/A	96.37	N/A	N/A
						N/A	N/A	N/A	N/A	678,044,434	N/A	N/A	N/A	N/A	667,897,337	N/A	N/A	N/A	N/A	98.50	N/A	N/A
			02		Fasilitasi Bantuan Hukum	N/A	268,309,950	360,282,950	500,752,650	N/A	N/A	261,339,650	358,671,600	498,666,150	N/A	N/A	97.40	99.55	99.58	N/A	N/A	N/A
			03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	N/A	218,640,818	287,864,168	353,418,058	N/A	N/A	210,198,314	282,308,422	345,458,489	N/A	N/A	96.14	98.07	97.75	N/A	N/A	N/A
4	01	02	2.04		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	N/A	125,957,700	230,842,250	163,521,425	329,827,650	N/A	71,720,550	186,311,030	153,752,504	292,950,500	N/A	56.94	80.71	94.03	88.82	27.21	42.16
			01		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	N/A	39,400,450	169,829,350	77,784,975	252,670,200	N/A	37,281,950	142,522,630	77,044,839	219,130,000	N/A	94.62	83.92	99.05	86.73	59.13	55.70
			02		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	N/A	22,420,650	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			03		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	N/A	64,136,600	61,012,900	85,736,450	77,157,450	N/A	34,438,600	43,788,400	76,707,665	73,820,500	N/A	53.70	71.77	89.47	95.68	4.73	21.00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	N/A	11,336,767,741	13,323,396,840	10,613,069,622	11,983,038,125	N/A	10,954,015,669	12,704,676,999	10,338,854,324	11,489,623,446	N/A	96.62	95.36	97.42	95.88	1.40	1.20
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	N/A	1,606,824,700	1,501,032,475	1,114,697,753	1,813,919,109	N/A	1,471,999,009	1,326,728,143	1,081,499,786	1,610,342,044	N/A	91.61	88.39	97.02	88.78	3.08	2.27
			01		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	N/A	873,708,700	650,876,050	625,506,185	1,070,351,250	N/A	788,397,000	637,350,950	608,326,535	905,132,676	N/A	90.24	97.92	97.25	84.56	5.21	3.51
			02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	N/A	490,284,350	603,766,225	252,426,100	406,811,100	N/A	446,316,350	449,639,225	242,086,663	379,378,050	N/A	91.03	74.47	95.90	93.26	(4.56)	-3.98
			03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	N/A	242,831,650	246,390,200	236,765,468	336,756,759	N/A	237,285,659	239,737,968	231,086,588	325,831,318	N/A	97.72	97.30	97.60	96.76	8.52	8.25
4	01	03	2.02		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	N/A	1,965,852,481	3,497,090,258	3,252,806,703	3,375,369,520	N/A	1,818,597,778	3,306,780,514	3,118,912,877	3,245,679,645	N/A	92.51	94.56	95.88	96.16	14.47	15.58
			01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	N/A	885,084,496	1,263,929,522	1,158,671,991	962,263,268	N/A	796,660,916	1,167,910,040	1,109,590,946	924,163,013	N/A	90.01	92.40	95.76	96.04	2.11	3.78
			02		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	N/A	759,024,485	1,561,004,686	1,491,925,308	637,087,768	N/A	706,624,302	1,486,020,521	1,418,738,021	608,866,948	N/A	93.10	95.20	95.09	95.57	(4.28)	-3.65
			03		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	N/A	321,743,500	672,156,050	602,209,404	1,776,018,484	N/A	315,312,560	652,849,953	590,583,910	1,712,649,684	N/A	98.00	97.13	98.07	96.43	53.28	52.66
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	7,166,161,010	7,826,760,057	5,707,589,088	5,895,047,394	N/A	7,072,820,850	7,581,290,146	5,603,359,650	5,771,666,999	N/A	98.70	96.86	98.17	97.91	(4.76)	-4.96
			01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	4,601,759,088	4,801,261,324	930,928,069	857,984,228	N/A	4,588,261,427	4,677,487,554	905,610,920	851,901,862	N/A	99.71	97.42	97.28	99.29	(34.29)	-34.36



				02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	N/A	895,039,658	551,763,808	815,993,067	1,612,887,299	N/A	845,125,966	495,090,507	808,688,827	1,547,002,926	N/A	94.42	89.73	99.10	95.92	15.86	16.32
				03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	1,669,362,264	2,473,734,925	3,960,667,952	3,424,175,867	N/A	1,639,433,457	2,408,712,085	3,889,059,903	3,372,762,211	N/A	98.21	97.37	98.19	98.50	19.67	19.76
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	N/A	597,929,550	498,514,050	537,976,078	898,702,102	N/A	590,598,032	489,878,196	535,082,011	861,934,758	N/A	98.77	98.27	99.46	95.91	10.72	9.91
				01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	N/A	533,173,450	248,749,400	291,334,728	580,653,068	N/A	526,982,432	245,962,900	289,810,880	550,390,604	N/A	98.84	98.88	99.48	94.79	2.16	1.09
						N/A	N/A	N/A	N/A	192,968,234	N/A	N/A	N/A	N/A	187,503,834	N/A	N/A	N/A	N/A	97.17	N/A	N/A
				02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	N/A	32,282,500	128,688,300	128,857,475	125,080,800	N/A	31,688,700	127,354,498	127,917,003	124,040,320	N/A	98.16	98.96	99.27	99.17	40.30	40.66
				03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	N/A	32,473,600	121,076,350	117,783,875	N/A	N/A	31,926,900	116,560,798	117,354,128	148,413,855,669	N/A	98.32	96.27	99.64	N/A	N/A	725.71



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator Perangkat Daerah selain melayani Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor juga bermitra dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bogor, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BLUD dan BUMD, Pengelola Pertambangan, UMKM, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Belum optimalnya implemtasi realisasi capaian Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, terutama dalam indikator-indikator yang berkaitan dengan fungsi koordinatif Sekretariat Daerah. Faktor ini disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya pada bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Administrasi Umum serta Perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dan Belum terintegrasi secara menyeluruh koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara terintegrasi lintas perangkat daerah, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya pelaporan kinerja, dan inefisiensi dalam pencapaian sasaran pembangunan merupakan permasalahan yang berdasarkan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.

Permasalahan lain yang berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disebabkan oleh Kebijakan umum dalam pelaksanaan koordinasi di bidang penataan ruang belum berjalan optimal. Implementasi kebijakan masih bersifat sektoral dan parsial, serta belum memperhatikan keterpaduan antara aspek tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Faktor ini disebabkan oleh Diskoneksi perencanaan antara tata ruang nasional, provinsi, dan daerah, yang berdampak pada tidak sinkronnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan

dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang, yang mengakibatkan masih tingginya pelanggaran terhadap kawasan konservasi tanah dan air, termasuk dalam kawasan lindung dan sempadan sungai dan Koordinasi lintas sektor dalam menyusun kebijakan penataan ruang belum optimal dilakukan oleh Sekretariat Daerah sebagai fasilitator utama.

Permasalahan implementasi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor menyebabkan berbagai kebijakan daerah tidak berjalan secara optimal, serta menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur terhadap pokok-pokok permasalahan yang dihadapi, uraian tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel 2.3 sebagai berikut

Tabel 2.8
Kertas Kerja Perumusan Permasalahan Sekretariat Daerah

URAIAN	PERMASALAHAN
<u>Identifikasi berdasarkan pencapaian kinerja (IKU, IKK)</u>	-
Belum Optimalnya Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Target	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat belum berjalan baik
	Belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Perencanaan, Distribusi, Pengendalian, Evaluasi terkait Perekonomian
	belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
	Belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi terkait urusan Sumber Daya Alam
	Belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi terkait urusan Administrasi Umum
<u>Identifikasi berdasarkan hasil analisis KLHS</u>	-
Kebijakan umum melaksanakan koordinasi pelaksanaan bidang penataan ruang belum optimal karena masih bersifat parsial	Kebijakan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan daerah
	Kebijakan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
	Pelanggaran terhadap Kawasan Konservasi tanah dan air di Kabupaten Bogor

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor didasarkan pada hasil analisis lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal, melalui pendekatan Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT). Analisis ini mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta peluang dan tantangan yang berkembang dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan nasional, dan dinamika sosial masyarakat.

Sebagai unsur perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan strategis, serta fasilitasi administrasi pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor memiliki peran yang sangat menentukan dalam mendorong efektivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Isu-isu strategis dirumuskan sebagai dasar dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah untuk periode 2025–2030, dengan tujuan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan menjamin terpenuhinya pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi masyarakat. Adapun rumusan isu strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Perumusan Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Daerah perlu memperkuat peran koordinatif lintas perangkat daerah untuk menjamin keterpaduan kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, serta efektivitas evaluasi kinerja pembangunan daerah. Lemahnya integrasi perencanaan dan rendahnya kualitas sinkronisasi antar bidang urusan menjadi hambatan dalam pencapaian indikator strategis daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan,

penyempurnaan mekanisme koordinasi, serta penguatan sistem evaluasi menjadi kebutuhan mendesak.

2. Penataan Kelembagaan dan Persiapan Kelembagaan untuk Daerah Otonomi Baru (DOB)

Sebagai respon terhadap dinamika dan rencana pemekaran wilayah, Sekretariat Daerah dihadapkan pada tantangan untuk menata kembali struktur perangkat daerah yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Evaluasi terhadap kelembagaan yang ada, serta kesiapan dalam mendukung pembentukan dan operasionalisasi DOB, menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

3. Penguatan Fasilitas Administrasi, Infrastruktur Pendukung, dan Tata Kelola Pemerintahan di Calon DOB

Dalam rangka mendukung rencana pembentukan DOB, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kesiapan administratif, teknis, dan infrastruktur dasar pemerintahan. Hal ini meliputi penyiapan regulasi, sistem informasi, dan sarana prasarana pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan di wilayah baru, agar tidak terjadi stagnasi atau kekosongan fungsi pemerintahan

Isu-isu strategis tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan misi Kabupaten Bogor, yang pada dasarnya membutuhkan dukungan koordinasi, fasilitasi, dan kebijakan yang tepat dari Sekretariat Daerah. Dengan memperkuat peran pengkoordinasian dan pengendalian atas pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

Guna mempermudah pemetaan isu strategis secara komprehensif, uraian berikut disusun dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.9
Kertas Kerja Perumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat belum berjalan baik	-	-	-	-	Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Perencanaan, Distribusi, Pengendalian, Evaluasi terkait Perekonomian	Belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Perencanaan, Distribusi, Pengendalian, Evaluasi terkait Perekonomian	-	-	-	-	Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Perekonomian
Jumlah Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	usulan arah kebijakan tahun 2025-2030	-	-	-	-	Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Jumlah Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	usulan arah kebijakan tahun 2025-2030	-	-	-	-	Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)
Jumlah koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Kebijakan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.	-	-	-	Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Jumlah koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi terkait urusan Sumber Daya Alam	Belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi terkait urusan Sumber Daya Alam	Pelanggaran terhadap Kawasan Konservasi tanah dan air di Kabupaten Bogor	-	-	-	Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait urusan Sumber Daya Alam

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang, sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Rumusan tujuan harus mampu merepresentasikan arah pembangunan organisasi yang terukur, relevan terhadap permasalahan aktual serta isu-isu strategis yang dihadapi, dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025–2030. Tujuan juga mencerminkan hasil utama yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah selama periode perencanaan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, kemampuan organisasi, dan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, tujuan menjadi dasar bagi perumusan sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama lima tahun ke depan.

Perumusan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor selaras dengan:

1. **Visi Daerah** : Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang;
2. **Misi Daerah** : Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
3. **Tujuan Daerah** : Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. **Sasaran Daerah** : Sasaran 1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi, dengan indikator utama Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang kemudian diturunkan menjadi indikator Nilai SAKIP.

Berdasarkan kerangka tersebut, maka tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025–2030 dirumuskan guna, **"Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel"**. Rumusan tujuan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan fungsi strategis Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), baik melalui fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, pembinaan administrasi, maupun penyediaan dukungan teknis terhadap seluruh perangkat daerah. Tujuan ini sekaligus menjadi orientasi dalam mendorong tercapainya sasaran

daerah secara menyeluruh melalui sinergi dan konsistensi pelaksanaan program lintas urusan pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur, melalui indikator, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini bukan hanya mencerminkan transparansi dan tanggung jawab lembaga, tetapi juga menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung kepala daerah, memegang peran sentral dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel. Guna membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memberikan pelayanan administratif yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan.

Oleh karena itu, Sekretariat Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis masing-masing. Pencapaian target kinerja perangkat daerah merupakan elemen penting yang secara langsung mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bogor, mengingat bahwa tujuan perangkat daerah merupakan turunan langsung dari sasaran pembangunan daerah.

Keberhasilan kinerja perangkat daerah akan berdampak pada keberhasilan kolektif Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pembangunan. Kinerja ini dinilai secara periodik oleh Pemerintah Pusat melalui sistem evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mencakup penilaian terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Semakin baik sistem akuntabilitas kinerja yang dibangun, maka semakin tinggi pula nilai AKIP daerah, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sekretariat Daerah tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai penggerak akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh. Peran ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sinergis, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan bentuk konkret, terukur, dan terarah dari tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Sasaran mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagai hasil langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi mandat institusi. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, sasaran bukan sekadar luaran administratif, melainkan merupakan wujud nyata dari keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berdaya saing, serta responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan kinerja instansi pemerintah, perumusan sasaran Sekretariat Daerah dilakukan dengan pendekatan SMART-C, yakni: *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur), *Agreeable* (Disepakati), *Realistic* (Realistis), *Time-Bounded* (Batasan Waktu) dan *Continuously Improved* (Ditingkatkan Secara Berkelanjutan). Dengan demikian, sasaran berperan sebagai penghubung strategis antara tujuan jangka menengah organisasi dan pencapaian langsung dari kegiatan tahunan yang dilaksanakan. Sasaran juga menjadi alat utama untuk mengarahkan penyusunan program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran, terukur hasilnya, dan dapat dimonitor serta dievaluasi secara berkala. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang memiliki peran koordinatif, fasilitatif, dan administratif, keberadaan sasaran menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa semua proses pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam mendukung Kepala Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor menjalankan peran utama dalam mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan, merumuskan kebijakan daerah, serta memberikan layanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Peran ini menjadi sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, serta sejalan dengan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025–2030, khususnya yang tertuang pada Misi Pertama yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik.”**

Dalam kerangka tersebut, sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada periode 2025–2030 adalah

“Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah”.

Sasaran ini merefleksikan komitmen Sekretariat Daerah untuk mengoptimalkan fungsi pengoordinasian, fasilitasi, dan pelayanan administratif dalam rangka mendorong seluruh perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Melalui penguatan peran koordinatif dan integratif, Sekretariat Daerah berupaya menciptakan sinergi antarsektor dan antarperangkat daerah guna mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Capaian dari sasaran ini secara langsung akan mendukung terwujudnya sasaran pembangunan daerah yang lebih luas, sebagaimana ditunjukkan melalui peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah termasuk *Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)* yang menjadi instrumen pengukuran makro yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah, dan sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan Sekretariat Daerah dalam menjalankan perannya sebagai pusat koordinasi dan pelayanan administratif pemerintahan Kabupaten Bogor. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan implementasi visi daerah **“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”** melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi hasil. Sebagai bentuk konkret, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah
Tahun 2025-2029

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel	Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	%	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	%	100	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi Sekretariat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan menyeluruh yang menggambarkan langkah-langkah terstruktur, sistematis, dan terukur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan, strategi memiliki peran yang sangat penting sebagai kerangka kerja operasional yang menjembatani antara visi jangka panjang dengan implementasi program dan kegiatan tahunan. Melalui strategi yang tepat dan relevan, perangkat daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta merespon secara adaptif terhadap dinamika lingkungan internal maupun eksternal.

Strategi tidak hanya difungsikan sebagai arah umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan, melainkan juga menjadi pedoman yang krusial dalam proses pengambilan keputusan, baik pada level kebijakan, manajerial, maupun teknis. Keberadaan strategi memungkinkan setiap pemangku kepentingan dalam organisasi untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pembangunan, prioritas kinerja, serta standar hasil yang diharapkan. Lebih lanjut, strategi juga menjadi alat kendali yang memastikan bahwa setiap proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome-oriented*). Hal ini diwujudkan melalui penyesuaian tahapan pelaksanaan yang diselaraskan dengan kondisi objektif daerah, kemampuan fiskal, kapasitas kelembagaan, serta kesiapan sumber daya manusia. Penetapan strategi yang baik memungkinkan adanya pengelolaan risiko yang lebih terencana dan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien. Selain itu, strategi dibentuk atas dasar evaluasi terhadap capaian sebelumnya, tantangan aktual, dan peluang masa depan, sehingga menjadi dokumen yang dinamis dan responsif. Dalam penyusunan strategi, perlu dilakukan identifikasi yang tajam terhadap isu-isu strategis, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang secara cepat dan kompleks.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan menuntut akuntabilitas tinggi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor merumuskan strategi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan, yaitu *“Meningkatnya kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akuntabel”*, dan mencapai sasaran, yaitu *“Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah”*.

Perumusan strategi dilakukan melalui pendekatan teknokratis dengan mempertimbangkan potensi dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan akan fokus pembangunan lintas bidang, serta pentahapan waktu pelaksanaan (*annual sequencing*) agar pelaksanaan strategi dapat diimplementasikan secara efektif dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun Fokus Strategis dan Langkah-Langkah Pencapaian adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi fungsi koordinatif dan kebijakan internal pemerintahan dengan langkah – langkah berupa meningkatkan kualitas koordinasi lintas perangkat daerah melalui sistem manajemen koordinasi yang terintegrasi, memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas daerah, guna memastikan keselarasan antarperangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan, mendorong peningkatan peran forum-forum koordinasi strategis seperti forum tapd, rakor pimpinan daerah, dan forum sekda se-jawa barat dalam pengambilan kebijakan berbasis data.
2. Peningkatan kualitas kebijakan dan evaluasi pemerintahan dengan upaya mengembangkan mekanisme penyusunan kebijakan yang berbasis pada kajian strategis dan evidence-based policy, meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara digital dan real-time, untuk mendukung pengambilan kebijakan yang responsif. dan mendorong harmonisasi kebijakan antarbagian dan biro melalui sinkronisasi regulasi internal serta penguatan kapasitas perumusan kebijakan.
3. Penguatan organisasi perangkat daerah dan kelembagaan DOB dengan melakukan penataan dan evaluasi organisasi perangkat daerah secara berkala sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika pelayanan public, mempersiapkan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sesuai arahan pemerintah pusat dan menyusun kerangka regulasi, sistem pendukung, dan struktur organisasi calon dob sebagai bagian dari tahapan transisi kelembagaan.
4. Penguatan administrasi dan pelayanan umum dengan langkah – langkah berupa menyempurnakan standar pelayanan administrasi internal, termasuk administrasi keuangan, persuratan, kepegawaian, dan hukum, mengembangkan sistem informasi manajemen

pemerintahan daerah yang terpadu dan adaptif terhadap perubahan regulasi dan meningkatkan kualitas sdm melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan manajerial untuk pejabat struktural dan pelaksana.

5. Pengendalian dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dengan Meningkatkan capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), melalui penguatan SAKIP perangkat daerah secara menyeluruh, Mengintegrasikan indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja daerah seperti IRB dan Nilai SAKIP dan Meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Secara lebih komperhensif dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.2
Prioritas Pembangunan Sekretariat Daerah Berdasarkan Penahapan
Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

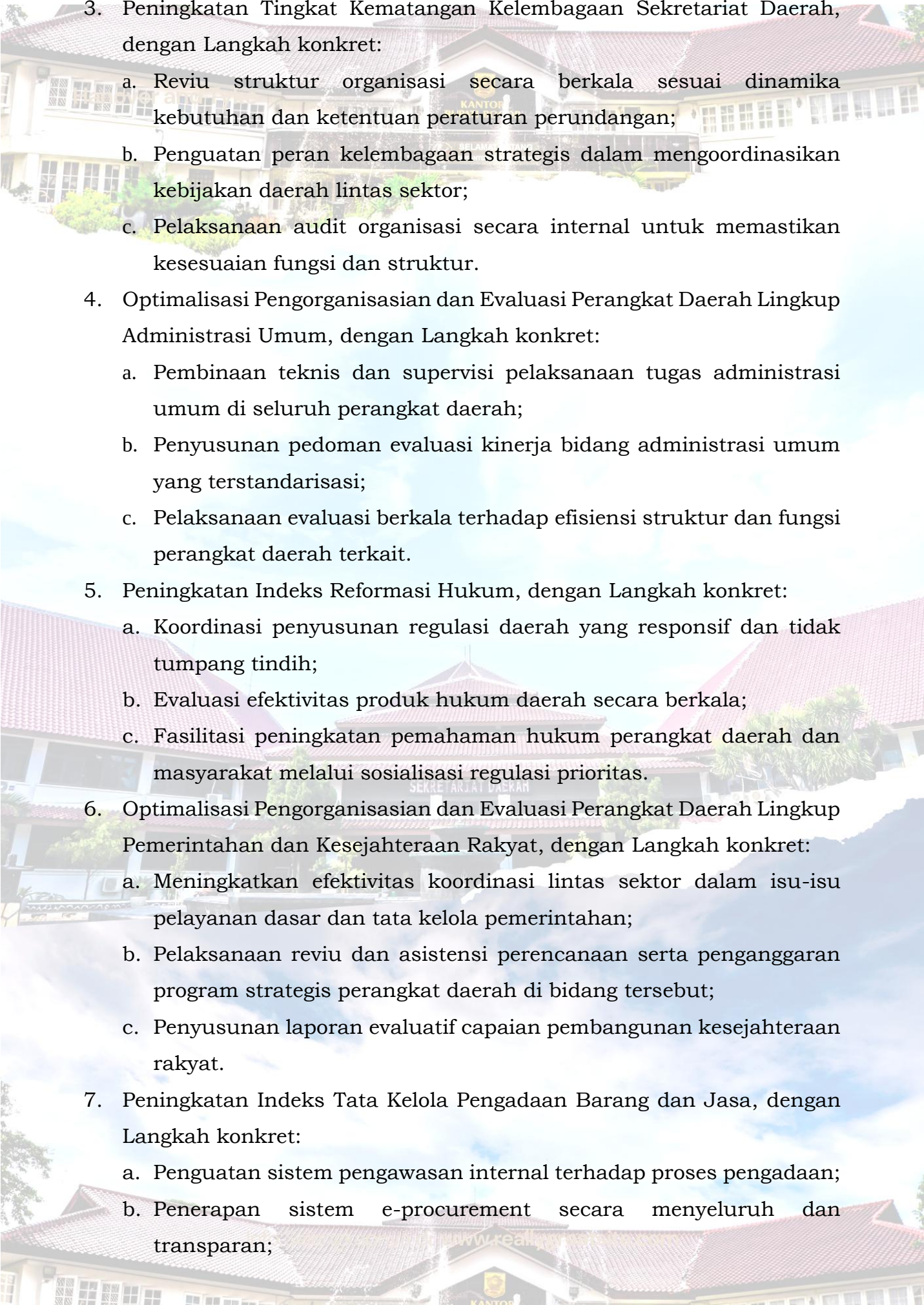
2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5	6
Strategi :	Strategi :	Strategi :	Strategi :	Strategi :	Strategi :
Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin Pemerintahan Yang Bersih dan Tanpa KKN	Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin Pemerintahan Yang Bersih dan Tanpa KKN	Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin Pemerintahan Yang Bersih dan Tanpa KKN	Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin Pemerintahan Yang Bersih dan Tanpa KKN	Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin Pemerintahan Yang Bersih dan Tanpa KKN	Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin Pemerintahan Yang Bersih dan Tanpa KKN
Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :
1. Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Penataan dan evaluasi organisasi PD	2. Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	2. Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	2. Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	2. Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	2. Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)
3. Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	3. Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	3. Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	3. Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	3. Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	3. Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)

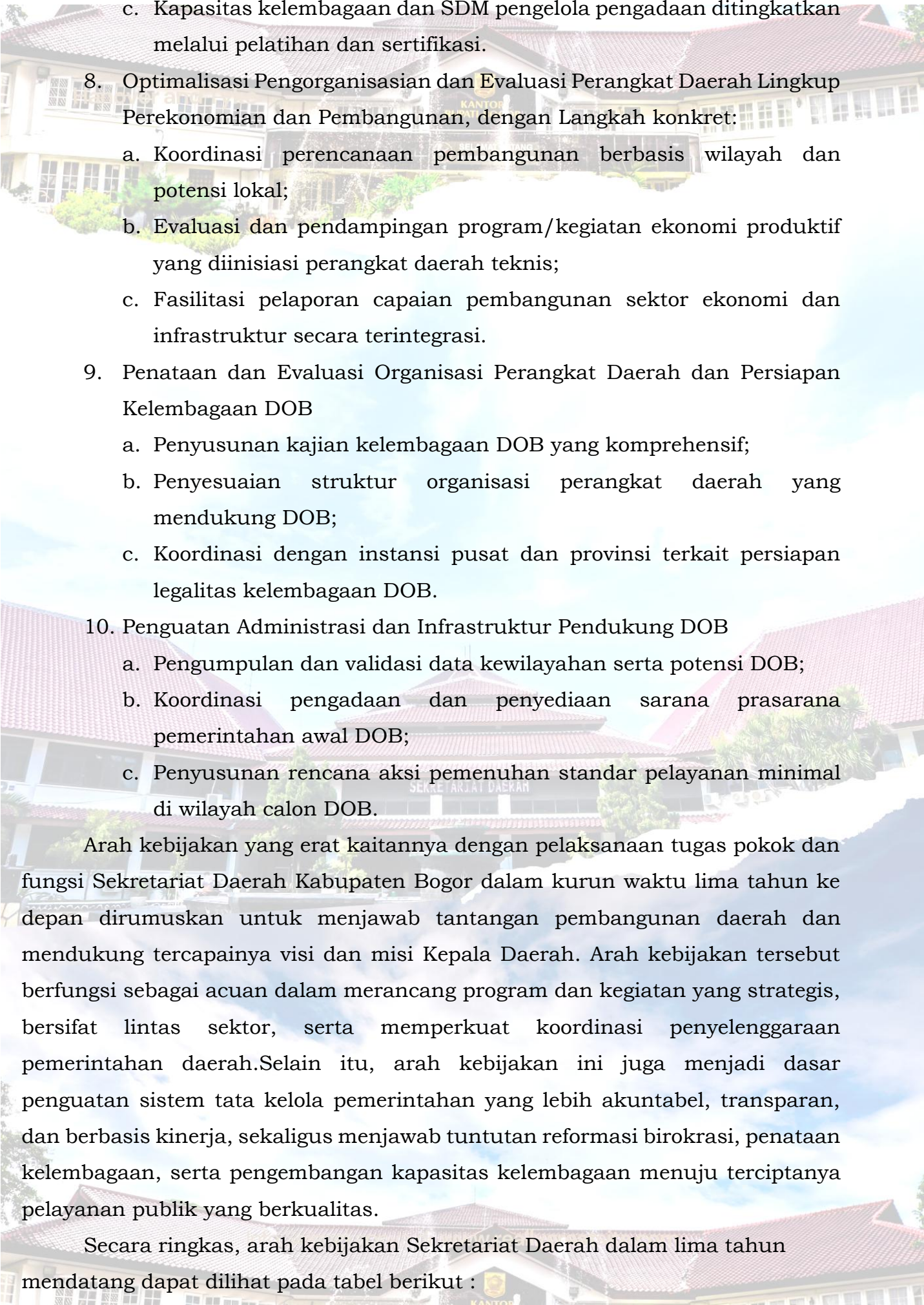
3.4 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan penjabaran operasional dari strategi pembangunan daerah yang dirancang sebagai kerangka kerja penyelesaian permasalahan dan antisipasi isu strategis. Dalam konteks perencanaan lima tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, arah kebijakan difokuskan pada upaya nyata dan bertahap guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan pengejawantahan dari strategi yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku secara nasional, sekaligus mempertimbangkan kewenangan yang melekat pada Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah pendukung urusan pemerintahan.

Selaras dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor, fokus utama arah kebijakan Sekretariat Daerah adalah peningkatan kualitas koordinasi, evaluasi, serta perumusan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Untuk menjabarkan arah tersebut secara lebih terukur dan implementatif, telah disusun arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah, dengan Langkah konkret:
 - a. Penguatan sistem pengukuran kinerja berbasis hasil (*result based performance*) dengan penyusunan indikator yang relevan dan terukur;
 - b. Optimalisasi peran Bagian Organisasi dan bagian pendukung lainnya dalam monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
 - c. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja melalui integrasi antara perencanaan dan penganggaran.
2. Peningkatan Implementasi Sistem Kerja Sekretariat Daerah, dengan Langkah konkret:
 - a. Penyusunan dan penyelarasan SOP antarbagian guna mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 - b. Digitalisasi proses administrasi dan layanan internal melalui sistem kerja elektronik;
 - c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung sistem kerja adaptif dan kolaboratif.

- 
3. Peningkatan Tingkat Kematangan Kelembagaan Sekretariat Daerah, dengan Langkah konkret:
 - a. Reviu struktur organisasi secara berkala sesuai dinamika kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. Penguatan peran kelembagaan strategis dalam mengoordinasikan kebijakan daerah lintas sektor;
 - c. Pelaksanaan audit organisasi secara internal untuk memastikan kesesuaian fungsi dan struktur.
 4. Optimalisasi Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah Lingkup Administrasi Umum, dengan Langkah konkret:
 - a. Pembinaan teknis dan supervisi pelaksanaan tugas administrasi umum di seluruh perangkat daerah;
 - b. Penyusunan pedoman evaluasi kinerja bidang administrasi umum yang terstandarisasi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap efisiensi struktur dan fungsi perangkat daerah terkait.
 5. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum, dengan Langkah konkret:
 - a. Koordinasi penyusunan regulasi daerah yang responsif dan tidak tumpang tindih;
 - b. Evaluasi efektivitas produk hukum daerah secara berkala;
 - c. Fasilitasi peningkatan pemahaman hukum perangkat daerah dan masyarakat melalui sosialisasi regulasi prioritas.
 6. Optimalisasi Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan Langkah konkret:
 - a. Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam isu-isu pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan reviu dan asistensi perencanaan serta penganggaran program strategis perangkat daerah di bidang tersebut;
 - c. Penyusunan laporan evaluatif capaian pembangunan kesejahteraan rakyat.
 7. Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, dengan Langkah konkret:
 - a. Penguatan sistem pengawasan internal terhadap proses pengadaan;
 - b. Penerapan sistem e-procurement secara menyeluruh dan transparan;

- 
- c. Kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola pengadaan ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi.
 8. Optimalisasi Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan Pembangunan, dengan Langkah konkret:
 - a. Koordinasi perencanaan pembangunan berbasis wilayah dan potensi lokal;
 - b. Evaluasi dan pendampingan program/kegiatan ekonomi produktif yang diinisiasi perangkat daerah teknis;
 - c. Fasilitasi pelaporan capaian pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur secara terintegrasi.
 9. Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dan Persiapan Kelembagaan DOB
 - a. Penyusunan kajian kelembagaan DOB yang komprehensif;
 - b. Penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah yang mendukung DOB;
 - c. Koordinasi dengan instansi pusat dan provinsi terkait persiapan legalitas kelembagaan DOB.
 10. Penguatan Administrasi dan Infrastruktur Pendukung DOB
 - a. Pengumpulan dan validasi data kewilayahan serta potensi DOB;
 - b. Koordinasi pengadaan dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan awal DOB;
 - c. Penyusunan rencana aksi pemenuhan standar pelayanan minimal di wilayah calon DOB.

Arah kebijakan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu lima tahun ke depan dirumuskan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Arah kebijakan tersebut berfungsi sebagai acuan dalam merancang program dan kegiatan yang strategis, bersifat lintas sektor, serta memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, arah kebijakan ini juga menjadi dasar penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan menuju terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

Secara ringkas, arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penguatan sistem pengukuran kinerja berbasis hasil (<i>result based performance</i>) dengan penyusunan indikator yang relevan dan terukur	Peningkatan kualitas Koordinasi, Evaluasi, dan Rumusan Kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Meningkatnya Nilai AKIP Sekretariat Daerah	
	Optimalisasi peran Bagian Organisasi dan bagian pendukung lainnya dalam monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala			
	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja melalui integrasi antara perencanaan dan penganggaran			
	Penyusunan dan penyelarasan SOP antarbagian guna mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas		Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	
	Digitalisasi proses administrasi dan layanan internal melalui sistem kerja elektronik			
	Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung sistem kerja adaptif dan kolaboratif			
	Reviu struktur organisasi secara berkala sesuai dinamika kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan		Tercapainya Tingkat Implementasi Sistem Kerja	
	Penguatan peran kelembagaan strategis dalam mengoordinasikan kebijakan daerah lintas sektor			
	Pelaksanaan audit organisasi secara internal untuk memastikan kesesuaian fungsi dan struktur			
	Pembinaan teknis dan supervisi pelaksanaan tugas administrasi umum di seluruh perangkat daerah;		Tercapainya Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah lingkup Administrasi Umum	
	Penyusunan pedoman evaluasi kinerja bidang administrasi umum yang terstandarisasi			
	Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap efisiensi struktur dan fungsi perangkat daerah terkait			
	Koordinasi penyusunan regulasi daerah yang responsif dan tidak tumpang tindih		Tercapainya Indeks Reformasi Hukum	

	Evaluasi efektivitas produk hukum daerah secara berkala			
	Fasilitasi peningkatan pemahaman hukum perangkat daerah dan masyarakat melalui sosialisasi regulasi prioritas			
	Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam isu-isu pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan		Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Pelaksanaan reviu dan asistensi perencanaan serta penganggaran program strategis perangkat daerah di bidang tersebut			
	Penyusunan laporan evaluatif capaian pembangunan kesejahteraan rakyat			
	Penguatan sistem pengawasan internal terhadap proses pengadaan		Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan	
	Penerapan sistem <i>e-procurement</i> secara menyeluruh dan transparan			
	Kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola pengadaan ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi			
	Koordinasi perencanaan pembangunan berbasis wilayah dan potensi lokal		Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan	
	Evaluasi dan pendampingan program/kegiatan ekonomi produktif yang diinisiasi perangkat daerah teknis			
	Fasilitasi pelaporan capaian pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur secara terintegrasi			
2	Penyusunan kajian kelembagaan DOB yang komprehensif		Tercapainya Tingkat Kematangan Kelembagaan	
	Penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah yang mendukung DOB	Penataan dan evaluasi organisasi PD dan persiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB)		
	Koordinasi dengan instansi pusat dan provinsi terkait persiapan legalitas kelembagaan DOB		Tercapainya Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah lingkup Administrasi Umum	
	Pengumpulan dan validasi data kewilayahan serta potensi DOB	Pengoordinasian penyiapan administrasi, infrastruktur pendukung dan sarana pemerintahan untuk calon Daerah Otonomi Baru (DOB)	Tercapainya Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Koordinasi pengadaan dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan awal DOB;			
	Penyusunan rencana aksi pemenuhan standar pelayanan minimal di wilayah calon DOB			

BAB IV

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor serta mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah, penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025–2030 mengacu secara langsung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025–2030. Penyelarasan ini dimaksudkan agar seluruh upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sinergis, terpadu, dan konsisten dalam bingkai sistem pemerintahan yang efektif dan efisien.

Program yang dirancang dalam Renstra Sekretariat Daerah merupakan himpunan kegiatan-kegiatan yang saling terkait dan dilaksanakan secara sistematis dalam suatu kerangka kerja terpadu. Program tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Setiap program disusun dengan memperhatikan relevansinya terhadap isu strategis, arah kebijakan, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kegiatan, sebagai bagian dari program, merupakan penjabaran yang lebih rinci dan bersifat operasional, dengan tujuan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Sekretariat Daerah. Pelaksanaan kegiatan dirancang secara terencana dan terukur, guna memastikan kebermanfaatan nyata dan keberlanjutan hasil yang dicapai.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025-20230, disusun secara rinci untuk menggambarkan keterkaitan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dan selaras dengan tujuan dan sasaran daerah. Informasi ini ditampilkan secara sistematis dalam Tabel 4.1, yang memuat rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2025-2030, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi	Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Akuntabel	Tercapainya Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
			Meningkatnya Nilai AKIP Sekretariat Daerah		Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pelaporan		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan		
			Tercapainya Tingkat Implementasi Sistem Kerja		Tingkat Implementasi Sistem Kerja		
			Tercapainya Tingkat Kematangan Kelembagaan		Tingkat Kematangan Kelembagaan		
			Tercapainya Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah lingkup Administrasi Umum		Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum		
					Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum		
				Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Perangkat Daerah			
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Sekretariat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terselenggaranya Asesment Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Asesment Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah		
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Bulanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Digitalisasi Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Penyelenggara n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan baik	Persentase barang milik daerah yang diadakan dengan baik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan	Jumlah Unit Dinas Bermotor operasional atau lapangan	PengadaanDinas Bermotor operasional atau lapangan	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Internet, Layanan Selular, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	

				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya gaji, tunjangan serta dana penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Gaji, Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terpenuhinya Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terpenuhinya medical Check Up Kepala Daerah	Persentase Layanan Medical Check Up Kepala Daerah yang Dilakukan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Meningkatnya kualitas Rumusan Kebijakan lingkup organisasi	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup organisasi	Penataan Organisasi	

				Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Tersusunnya rumusan kebijakan lingkup keorganisasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan efektivitas efisiensi organisasi)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan berupa Kepbup/Perbup Kelembagaan)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Tersusunnya Kajian dan Naskah Akademik Kelembagaan	Jumlah Dokumen Kajian dan Naskah Akademik Kelembagaan yang tersusun		
				Meningkatnya kualitas implementasi sistem kerja	Kategori Penerapan Sistem Kerja Berdasarkan SE Menpan No 15 Tahun 2023	Penataan Organisasi	
				Tersusunnya rancangan kebijakan implementasi sitem kerja	Jumlah rancangan Perbup/Kepbup/SE Implementasi Sistem Kerja 2025	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Terlaksananya FGD/Sharing session implementasi sistem kerja sebagai media evaluasi	Laporan Hasil FGD/Sharing Session		
				Tersusunnya telaahan staf terkait implementasi sistem kerja berdasarkan hasil evaluasi implementasi sistem kerja	Telaahan Staff sebagai bahan perumusan kebijakan Sistem Kerja Tahun 2026		
				Meningkatnya kematangan kelembagaan perangkat daerah	Persentase kematangan kelembagaan PD pada level sangat tinggi	Penataan Organisasi	
				Terlaksananya sosialisasi pementapan implementasi kematangan kelembagaan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi dan asistensi/konseling kelembagaan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Terlaksananya evaluasi kematangan kelembagaan PD	Laporan Hasil Evaluasi Kematangan Kelembagaan kepada PPK dan kepada Kemendagri		
				Meningkatnya Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Penataan Organisasi	

				Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kepegawaian sesuai dengan hasil Anjab ABK	Jumlah fasilitasi kepegawaian yang terpenuhi sesuai kebutuhan manajemen SDM	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Terfasilitasinya perhitungan kebutuhan jabatan fungsional bersama Instansi Pembina dan BKPSDM	Jumlah Kebutuhan/For masi JF yang tersusun sesuai pedoman perhitungan kebutuhan JF		
				Usulan Penetapan Kebutuhan JF kepada Kemenpan RB berdasarkan rekomendasi Instansi Pembina	Jumlah Kebutuhan JF yang diusulkan penetapannya ke Kementerian PAN dan RB		
				Terintegrasinya sistem informasi jabatan dengan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen laporan pengembangan sistem informasi jabatan yang terintegrasi		
				Meningkatnya kualitas Tata Laksana	Persentase koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi tata laksana	Penataan Organisasi	
				Terlaksananya penyusunan kebijakan tata laksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kebijakan berupa Kepbup dan SE terkait pengaturan tata laksana secara efektif dan efisien.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Tersusunnya rancangan Peta Bisnis Proses sesuai RPJMD 2025-2029	Rancangan Kepbup Peta Bisnis Proses sesuai RPJMD Kabupaten Bogor 2025-2029		
				Terlaksananya sosialisasi Tata Laksana	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Tata Laksana		
				Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
				Terlaksananya fasilitasi perangkat daerah dalam evaluasi dan penyusunan SOP	Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannya		
					Jumlah SOP PD yang dievaluasi		

				Tersusunnya rumusan kebijakan fleksibilitas kerja	Rumusan Kebijakan Fleksibilitas Kerja		
				Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	Penataan Organisasi	
				Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Tersusunnya dokumen Renaksi RB)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Jumlah Keppub Renaksi RB)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Monev Pencapaian Renaksi RB	Jumlah Capaian Monev Implementasi Renaksi RB yang terkoordinasi dan terinput dalam Portal RB Menpan		
				Terlaksananya Roadshow RB ke PD untuk meningkatkan kualitas implementasi RB PD	Jumlah pelaksanaan Roadshow RB		
				Terlaksananya Penguatan Kapasitas pimpinan dalam mendorong perubahan organisasi melalui FGD dan Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi/FGD Mindset Reform Level Pimpinan JPT dan Administrator		
				Terlaksananya forum konsultasi Organisasi Secara On Line melalui Warung Nasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi tema keorganisasian melalui "Warung Nasi"		
				Terlaksananya Penilaian RB PD melalui aplikasi SURABI	Jumlah Sosialisasi/Fasilitasi PD dan Evaluator dalam penilaian RB PD (sosialisasi ke PD 1, pleno kab 2, pleno prop 2)		
					Dokumen Laporan Sementara dan Keputusan Final Hasil evaluasi RB PD		
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi pelayanan publik	Penataan Organisasi	
				Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

				Publik dan Tata Laksana	Tata Laksana (PEKPP, KPP dan IKM semester 1 dan 2/tahunan)		
				Bintek penguatan ZI bagi TPI dan PD target	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis ZI bagi TPI dan PD Target		
				Fasilitasi ZI PD bersama dengan APIP	Jumlah dokumen laporan pembangunan Zona Integritas		
				Terlaksananya sosialisasi pelayanan publik	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Yanlik		
				Meningkatnya Kinerja dan implementasi Reformasi Birokrasi	Persentase dokumen peningkatan Kinerja dan implementasi RB yang terselenggara	Penataan Organisasi	
				Terfasilitasinya Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Kepala PD serta Administrator berdasarkan IKU Daerah dan IKU PD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Camat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Dokumen IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah		
				Terusunnya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
				Tersosialisasi dan terfasilitasinya penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/Bintek Akuntabilitas Kinerja kepada PD		
					Jumlah pedoman penyusunan LKjIP Perangkat Daerah		
				Terfasilitasinya implementasi SAKIP melalui e SAKIP terintegrasi	Dokumen laporan pengembangan aplikasi e SAKIP sesuai kebutuhan		

					Jumlah pemenuhan data e SAKIP Terintegrasi (perencanaan, persiapan penilaian dan perubahan)		
				Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
				Termonitornya Media Sosial dan Media Online Terkait Pimpinan Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Akun Media Sosial dan Media Online		
			Tercapainya Indeks Reformasi Hukum		Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Tercapainya Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
					Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
				Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Lingkup Tata Pemerintahan	Rata-rata Penerapan SPM Kabupaten Bogor	Administrasi Tata Pemerintahan	
				Terselenggaranya Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan SPM Kabupaten Bogor	Jumlah Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan SPM Kabupaten Bogor	Penataan Administrasi Pemerintahan	

				Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Lingkup Tata Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	
				Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
				Terlaksananya Kunjungan Kerja Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan Kepala Daerah ke Kecamatan		
				Terselenggaranya Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Bantuan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Bantuan Infrastruktur Kelurahan		
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Terselenggaranya Kajian Kapasitas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kapasitas Daerah		
				Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		
				Meningkatnya kualitas Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
				Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	

				Terselenggarakan Pengkordinasian Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Terselenggarakan Kegiatan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pengkordinasian Lingkup Kesejahteraan Masyarakat		
				Terselenggarakan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Lingkup Kesejahteraan Masyarakat		
				Meningkatnya kualitas Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hibah Keagamaan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Terselenggarakan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Laporan Penyelenggaraan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
				Terselenggarakan Hibah Lembaga Keagamaan	Laporan Penyelenggaraan Hibah Lembaga Keagamaan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan sesuai Program Pembentukan Peraturan Bupati Peraturan Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Meningkatnya Kualitas Regulasi Daerah	Tingkat Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terlaksananya Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dan Terpenuhinya Data Pendukung Dalam Pelaksanaan Harmonisasi	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Di Harmonisasi	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	

					Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat yang Berkualitas	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Tercapainya Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkualitas	Jumlah Asn Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Dibidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Hasil Reviu	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terlaksananya Reregulasi Dan Deregulasi Produk Hukum Daerah sebagai Hasil Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum	Jumlah Laporan pelaksanaan di Reregulasi dan Deregulasi sebagai Tindak Lanjut dari Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terdokumentasi nya Produk Hukum Daerah Dalam Jdih Dan Terkelolanya Jdih Terintegrasi Sesuai Dengan Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Jdih Terintegrasi Sesuai Dengan Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Meningkatnya Kualitas penanganan Perkara hukum ASN dan Pejabat Daerah	Persentase Perkara yang Ditangani	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu		
				Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Jumlah Penyuluhan Hukum Aparatur		

				Persentase Ketercapaian Target Rencana Aksi Nasional HAM	Persentase Ketercapaian Target Rencana Aksi Nasional HAM	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Penyampaian Bukti Dukung Pemenuhan Rencana Aksi	Penyampaian Bukti Dukung Pemenuhan Rencana Aksi	Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Meningkatnya Kinerja Daerah sebagai dampak kerjasama Daerah	Persentase Implementasi Kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
				Terfasilitasinya Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
				Terfasilitasinya Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
			Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Tercapainya Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan		
					Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan		
				Meningkatnya Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perekonomian	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	

				Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengendalian inflasi daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Terhadap Pembinaan BUMD	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Terselenggaranya Pelaksanaan Koordinasi Terkait Inflasi Kabupaten Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Meningkatnya kualitas Rumusan Kebijakan lingkup perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
				Meningkatnya kualitas Rumusan Kebijakan lingkup administrasi pembangunan	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup administrasi pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Tersedianya data perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu dan akurat	Persentase data perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu dan akurat	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Tersedianya Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah Laporan Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Meningkatnya kualitas Rumusan Kebijakan lingkup pengadaan barang dan jasa	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

				Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggara n Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terpenuhinya Data Pendukung Kematangan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Penilaian Tingkat Kematangan UKPBJ yang terpenuhi	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggara n Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan PDN Dalam PBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terselenggaranya sosialisasi aturan Penggunaan PDN	Jumlah Sosialisasi aturan Pengaturan PDN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggara n Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Sirup	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terumumkanny a Rencana Umum Pengadaan	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggara n Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Tendering	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya RUP dengan metode tender	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Tender	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	



				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Katalog	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terselesaikanny a belanja di e-katalog	Persentase Terselesaikann ya Pengadaan secara e-Katalog	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Toko Daring	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Belanja di Toko Daring	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan pada Toko Daring	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Barang dan Jasa	Non E-Tendering/Non E-Purchasing	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya RUP dengan metode Non e-Tender dan Non e-purchasing	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Non e-Tender dan Non e-Purchasing di banding RUP	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Kontrak	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Teruploadnya kontrak pada sistem	Persentase Kontrak yang Terupload pada Sistem	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Barang dan Jasa	Kualifikasi Dan Kompetensi SDM PBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terpenuhinya Kebutuhan SDM PBJ	Jumlah SDM PBJ yang terqualifikasi dan berkompetensi	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Meningkatnya kualitas Rumusan Kebijakan lingkup Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	

				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030 merupakan bentuk konkrit dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis, arah kebijakan, dan kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai kelanjutan dari perumusan program dan kegiatan prioritas, tahapan berikutnya adalah menetapkan indikator kinerja dan target capaian yang terukur untuk masing-masing program dan kegiatan, agar pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi secara objektif. Indikator kinerja tersebut mencakup indikator outcome untuk program dan indikator output untuk kegiatan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Selain itu, penjabaran program dan kegiatan ini juga mencantumkan kelompok sasaran yang merupakan pihak penerima manfaat utama dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, baik berupa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor maupun pemangku kepentingan lainnya yang relevan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun, ditetapkan pula alokasi pendanaan indikatif, yaitu estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyeksi berdasarkan perhitungan kebutuhan riil dan kebijakan fiskal daerah. Pendanaan indikatif ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan penganggaran berbasis kinerja.

Penetapan indikator kinerja, target tahunan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana, terarah pada capaian sasaran, serta dapat dievaluasi tingkat efektivitas dan efisiensinya setiap tahun. Dengan demikian, diharapkan Sekretariat Daerah dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Secara lengkap, penjabaran rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, target tahunan, dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2025–2030 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dan Pendanaan Tahun 2025-2030

Urusan / Unsur : Penunjang
 Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2030														
			2024		2025		2026 - SIFD		2027			2028		2029		2030	
			REALISASI	PAGU - Realisasi	TARGET	PAGU - Realisasi	TARGET	PAGU - Realisasi	TARGET	PAGU - Realisasi	TARGET	PAGU - Realisasi	TARGET	TARGET	PAGU - Realisasi	TARGET	PAGU - Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SEKRETARIAT DAERAH				144,302,717,134		191,105,742,735		182,344,942,342		198,495,961,162		205,461,487,740			211,183,761,046		221,204,450,654
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Predikat	N/A	103,537,734,583	BB	147,705,931,420	BB	137,521,587,075	BB	153,957,220,026	BB	159,254,012,996	BB	BB	163,660,585,019	BB	171,392,912,632
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Poin	N/A	375,287,244	11,85	210,885,659	11,90	303,365,904	11,92	215,019,228	11,94	222,416,818	11,94	11,96	228,571,110	11,98	239,370,208
	Tingkat Implementasi Sistem Kerja	%	N/A	162,779,925	80	129,106,350	100	217,466,444	100	131,636,963	100	136,165,843	100	100	139,933,563	100	146,544,881
	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Predikat	N/A	162,779,925	Tinggi	129,106,350	Tinggi	217,466,444	Tinggi	131,636,963	Sangat Tinggi	136,165,843	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	139,933,563	Sangat Tinggi	146,544,881

	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Administrasi Umum	%	N/A	182,194,050	100	127,496,150	100	218,154,227	100	129,995,201	100	134,467,597	100	100	138,188,327	100	144,717,189
	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	%	N/A	133,952,175	100	107,167,775	100	193,932,635	100	109,268,370	100	113,027,673	100	100	116,155,159	100	121,643,039
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%		458,566,752	100	419,013,318	100	1,292,399,286	100	1,193,792,035	100	1,230,799,588	100	100	1,268,954,375	100	1,308,291,961
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	127,611,368	6	138,606,084	6	618,105,618	6	463,950,000.00	6	478,332,450.00	6	6	493,160,755.95	6	508,448,739
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	61,426,800	1	59,879,500	1	125,749,975	1	206,200,000.00	1	212,592,200.00	1	1	219,182,558.20	1	225,977,218
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	29,588,300	1	22,403,975	1	59,999,850	1	61,860,000.00	1	63,777,660.00	1	1	65,754,767.46	1	67,793,165
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	46,975,000	1	35,305,725	1	45,754,475	1	51,595,492.88	1	53,194,953.15	1	1	54,843,996.70	1	56,544,161
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	31,378,500	1	24,983,800	1	34,221,500	1	35,282,507.75	1	36,376,265.49	1	1	37,503,929.72	1	38,666,552
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	103,164,284	3	86,486,859	3	106,817,868	3	112,004,704.73	3	115,476,850.58	3	3	119,056,632.94	3	122,747,389
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	58,422,500	4	41,579,375	4	262,150,000	4	206,200,000.00	4	212,592,200.00	4	4	219,182,558.20	4	225,977,218

Penyelenggaraan WaliData Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen			1	9,768,000	1	39,600,000	1	56,699,329.50	1	58,457,008.71	1	1	60,269,175.98	1	62,137,520
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Sekretariat Daerah	%	100	55,071,722,380	100	58,278,096,912	100	58,421,273,856	100	61,677,611,064	100	63,589,617,007	100	100	65,560,895,134	100	67,593,282,883
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	224	54,620,244,010	224	57,794,245,484	224	57,794,245,484	224	60,873,420,725.73	224	62,760,496,768.23	224	224	64,706,072,168.04	300	66,711,960,405
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	242,065,318	2	251,159,011	2	343,209,918	2	515,500,000.00	2	531,480,500.00	2	2	547,956,395.50	2	564,943,044
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	54,829,384	2	37,014,515	2	56,798,518	2	67,015,000.00	2	69,092,465.00	2	2	71,234,331.42	2	73,442,596
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	83,323,268	1	65,899,393	1	75,721,486	1	115,945,599.13	1	119,539,912.70	1	1	123,245,650.00	1	127,066,265
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	35,334,800	16	105,178,059	16	128,209,075	16	35,795,417.88	16	36,905,075.83	16	16	38,049,133.18	16	39,228,656
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	35,925,600	2	24,600,450	2	23,089,375	2	69,934,320.83	2	72,102,284.78	2	2	74,337,455.61	2	76,641,917
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%		18,539,100	100	14,977,896	100	13,781,427	100	14,211,476	100	14,652,032	100	100	15,106,245	100	15,574,539
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) Sekretariat Daerah	Dokumen	1	1,247,700	1	968,142	1	890,331	1	918,601.41	1	947,078.05	1	1	976,437.47	1	1,006,707
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Laporan	1	2,385,300	1	1,855,476	1	1,705,848	1	1,760,530.45	1	1,815,106.89	1	1	1,871,375.20	1	1,929,388

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	14,906,100	1	12,154,278	1	11,185,248	1	11,532,344.32	1	11,889,846.99	1	1	12,258,432.25	1	12,638,444
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%		1,834,389,131	100	2,750,291,891	100	2,991,183,915	100	2,733,636,261	100	2,818,378,985	100	100	2,905,748,733	100	2,995,826,944
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	353,824,750	12	784,768,855	12	722,106,204	12	744,612,299.63	12	767,695,280.91	12	12	791,493,834.62	12	816,030,143
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	183,106,083	6	174,848,636	6	160,881,391	6	165,901,646.32	6	171,044,597.36	6	6	176,346,979.88	6	181,813,736
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	288,335,850	1	280,674,400	1	258,196,320	1	266,312,314.78	1	274,567,996.54	1	1	283,079,604.44	1	291,855,072
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Asesment Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah	Laporan			1		1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	201	1,009,122,448	30	1,510,000,000	30	1,850,000,000	30	1,556,810,000.00	30	1,605,071,110.00	30	30	1,654,828,314.41	30	1,706,127,992
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%		15,132,663,318	100	35,560,954,679	100	25,673,337,468	100	24,858,568,341	100	25,629,183,959	100	100	26,423,688,662	100	27,242,823,011
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	294,675,250	6	455,741,449	6	419,413,920	6	432,421,197.26	6	445,826,254.38	6	6	459,646,868.26	6	473,895,921
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	5,528,122,918	15	16,851,048,872	15	15,211,987,769	15	14,072,863,635.63	15	14,509,122,408.33	15	15	14,958,905,202.99	15	15,422,631,264
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	3,125,704,400	4	3,424,144,700	4	3,151,242,975	4	3,248,931,509.29	4	3,349,648,386.07	4	4	3,453,487,486.04	4	3,560,545,598
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	283,605,250	45	212,311,199	45	195,389,925	45	201,447,252.90	45	207,692,117.74	45	45	214,130,573.39	45	220,768,621

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Bulanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	5,631,722,125	12	14,405,442,059	12	6,499,999,720	12	6,701,500,000.00	12	6,909,246,500.00	12	12	7,123,433,141.50	12	7,344,259,569
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Digitalisasi Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	268,833,375	1	212,266,400	1	195,303,159	1	201,404,745.80	1	207,648,292.92	1	1	214,085,390.00	1	220,722,037
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%		1,737,111,599	100	1,178,370,856	100	2,560,400,000	100	2,637,442,866	100	2,719,203,595	100	100	2,803,498,906	100	2,890,407,372
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	1,737,111,599	12	1,178,370,856	12	2,560,400,000	12	2,637,442,865.81	12	2,719,203,594.65	12	12	2,803,498,906.08	12	2,890,407,372
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan dengan baik	%		1,375,700,000	100	1,713,594,468	100	1,977,022,000	100	1,821,484,089	100	1,821,484,089	100	100	1,936,166,549	100	1,996,187,712
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	1,375,700,000	3	1,713,594,468	3	1,577,022,000	3	1,761,484,089	3	1,761,484,089	3	3	1,876,166,549	3	1,936,187,712
Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Bermotor operasional atau lapangan	Unit					1	400,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	1	60,000,000	1	60,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		10,607,264,174	100	12,891,888,689	100	12,221,775,197	100	12,232,211,852	100	12,611,410,419	100	100	13,002,364,142	100	13,405,437,430
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1,862,530,790	2	1,745,446,644	2	1,606,592,526	2	1,656,132,289	2	1,707,472,390.15	2	2	1,760,404,034.25	2	1,814,976,559
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Internet, Layanan Selular, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	3,998,154,908	4	4,457,736,972	4	4,459,625,344	4	4,229,634,953.72	4	4,360,753,637.29	4	4	4,495,937,000.04	4	4,635,311,047
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,380,151,034	1	1,441,583,999	1	1,326,690,715	1	1,367,818,269.44	1	1,410,220,635.80	1	1	1,453,937,475.51	1	1,499,009,537

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3,366,427,442	4	5,247,121,074	4	4,828,866,612	4	4,978,626,339	4	5,132,963,755.76	4	4	5,292,085,632.19	4	5,456,140,287
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%		6,839,521,366	100	10,383,319,635	100	12,228,394,441	100	24,884,286,452	100	26,236,284,489	100	100	26,461,090,475	100	29,940,233,757
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	296,303,463	6	713,890,000	6	675,560,000	6	677,360,310	6	698,358,479	6	6	720,007,592	6	742,327,828
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	256	657,538,503	256	1,144,485,000	256	1,143,750,000	256	1,085,921,801	256	1,119,585,377	256	256	1,154,292,523	256	1,190,075,592
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	110,889,000	5	60,000,000	5	55,217,700	5	56,929,804	5	58,694,628	5	5	60,514,162	5	62,390,101
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	5,774,790,400	1	8,464,944,635	1	9,953,865,941	1	21,785,671,617	1	23,081,243,084	1	1	23,167,383,751	1	26,544,422,125
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	1	200,000,000	1	1,277,402,920	1	1,277,402,920	1	1	1	1,357,892,446	1	1,400,018,112
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit				1	200,000,800	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1	1	1,000,000	1	1,000,000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Medical Check Up Kepala Daerah yang Dilakukan	%		-	100	240,000,000	100	220,872,075	100	227,719,220	100	234,778,515	100	100	242,056,649	100	249,560,406
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	-	-	2	240,000,000	2	220,872,075	2	227,719,220	2	234,778,515	2	2	242,056,649	2	249,560,406
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	%		1,260,387,425	100	5,255,552,066	100	3,188,640,450	100	3,955,625,917	100	4,078,250,320	100	100	4,204,676,080	100	4,335,021,039

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	996,721,225	12	2,376,709,312	12	1,602,087,600	12	1,739,593,300	12	1,793,520,692	12	12	1,849,119,834	12	1,906,442,549
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	-	-	12	1,941,743,901	12	724,384,200	12	1,326,885,032	12	1,368,018,468	12	12	1,410,427,041	12	1,454,150,279
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	9	263,666,200	12	937,098,853	12	862,168,650	12	889,147,584	12	916,711,160	12	12	945,129,205	12	974,428,211
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Gaji, Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	%		5,740,316,726	100	10,879,274,225	100	9,320,901,960	100	9,996,587,308	100	10,306,481,515	100	100	10,625,982,442	100	10,955,387,897
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	12	756,307,300	24	1,581,178,976	24	1,581,178,976	24	2,039,024,903	24	2,102,234,675	24	24	2,167,403,950	24	2,234,593,473
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	12	4,984,009,426	24	9,298,095,249	24	7,739,722,984	24	7,957,562,405	24	8,204,246,839	24	24	8,458,578,491	24	8,720,794,425
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%		267,050,000	100	601,300,000	100	553,376,775	100	570,531,530	100	588,218,008	100	100	606,452,766	100	625,252,802
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	6	267,050,000	100	601,300,000	100	553,376,775	100	570,531,530	100	588,218,008	100	100	606,452,766	12	625,252,802
Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup organisasi	%		162,779,925	100	129,106,350	100	217,466,444	100	131,636,963	100	136,165,843	100	100	139,933,563	100	146,544,881
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan berupa Kepbup/Perbup Kelembagaan)	Dokumen	20	162,779,925	20	129,106,350	20	217,466,444	20	131,636,963	20	136,165,843	20	20	139,933,563	20	146,544,881
	Jumlah Dokumen Kajian dan Naskah Akademik Kelembagaan yang tersusun	Dokumen	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-

Penataan Organisasi	Kategori Penerapan Sistem Kerja Berdasarkan SE Menpan No 15 Tahun 2023	Kategori	-	-	4	-	4,5	-	5	-	5,5	-	5,5	6	-	6,5	-
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah rancangan Perbup/Kepbup/SE Implementasi Sistem Kerja 2025	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	Laporan Hasil FGD/Sharing Session	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	Telaahan Staff sebagai bahan perumusan kebijakan Sistem Kerja Tahun 2026	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	Persentase kematangan kelembagaan PD pada level sangat tinggi	%	-	-	35	-	45	-	55	-	65	-	65	75	-	85	-
	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi dan asistensi/konseling kelembagaan	Perangkat Daerah	-	-	76	-	76	-	76	-	76	-	76	76	-	76	-
	Laporan Hasil Evaluasi Kematangan kepada PPK dan kepada Kemendagri	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	-	100	-
	Jumlah fasilitasi kepegawaian yang terpenuhi sesuai kebutuhan manajemen SDM	Kegiatan	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	3	-	3	-
	Jumlah Kebutuhan/Formasi JF yang tersusun sesuai pedoman perhitungan kebutuhan JF	Jenis JF	-	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	10	-	10	-
	Jumlah Kebutuhan JF yang diusulkan penetapannya ke Kementerian PAN dan RB	Jenis JF	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	3	-	3	-
	Jumlah dokumen laporan pengembangan sistem informasi jabatan yang terintegrasi	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-

Penataan Organisasi	Persentase koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi tata laksana	%		133,952,175	100	107,167,775	100	193,932,635	100	109,268,370	100	113,027,673	100	100	116,155,159	100	121,643,039
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kebijakan berupa Kepbup dan SE terkait pengaturan tata laksana secara efektif dan efisien.	Dokumen	-	-	5	-	5.00	-	5	-	5	-	5	5	-	5	-
	Rancangan Kepbup Peta Bisnis Proses sesuai RPJMD Kabupaten Bogor 2025-2029	Dokumen	-	-	1	-	1.00	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Tata Laksana	Dokumen	-	-	1	-	1.00	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3	133,952,175	3	107,167,775	3	193,932,635	3	109,268,370	3	113,027,673	3	3	116,155,159	3	121,643,039
	Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannya	Jenis SOP	-	-	5	-	5.00	-	5	-	5	-	5	5	-	5	-
	Jumlah SOP PD yang dievaluasi	PD	-	-	76	-	76.00	-	76	-	76	-	76	76	-	76	-
	Rumusan Kebijakan Fleksibilitas Kerja	Dokumen	-	-	1	-	1.00	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Penataan Organisasi	Tingkat Capaian RB Perangkat Daerah minimal Baik	%		182,194,050	19.44	127,496,150	28	218,154,227	47.22	129,995,201	59.72	134,467,597	59.72	72.22	138,188,327	79.16	144,717,189
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Jumlah Kepbup Renaksi RB)	Dokumen	1	182,194,050	2	127,496,150	2	218,154,227	2	129,995,201	2	134,467,597	2	2	138,188,327	2	144,717,189
	Jumlah Capaian Monev Implementasi Renaksi RB yang terkoordinasi dan terinput dalam Portal RB Menpan	Kegiatan	-	-	4	-	4.00	-	4	-	4	-	4	4	-	4	-
	Jumlah pelaksanaan Roadshow RB	Perangkat Daerah	-	-	8	-	8.00	-	8	-	8	-	8	8	-	8	-

	Jumlah Sosialisasi/FGD Mindset Reform Level Pimpinan JPT dan Administrator	Kegiatan	-	-	2	-	2.00	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi tema keorganisasian melalui "Warung Nasi"	Kegiatan	-	-	8	-	8.00	-	8	-	8	-	8	8	-	8	-
	Jumlah Sosialisasi/Fasilitasi PD dan Evaluator dalam penilaian RB PD (sosialisasi ke PD 1, pleno kab 2, pleno prop 2)	Kegiatan	-	-	5	-	5.00	-	5	-	5	-	5	5	-	5	-
	Dokumen Laporan Sementara dan Keputusan Final Hasil evaluasi RB PD	Dokumen	-	-	2	-	2.00	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-
			-	-		-		-		-		-			-		-
Penataan Organisasi	Persentase Koordinasi, fasilitasi serta sosialisasi pelayanan publik	%		162,779,925	100	129,106,350	100	217,466,444	100	131,636,963	100	136,165,843	100	100	139,933,563	100	146,544,881
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (PEKPP, KPP dan IKM semester 1 dan 2/tahunan)	Dokumen	3	162,779,925	4	129,106,350	4	217,466,444	4	131,636,963	4	136,165,843	4	4	139,933,563	4	146,544,881
	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis ZI bagi TPI dan PD Target	Kegiatan	-	-	2	-	2.00	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-
	Jumlah dokumen laporan pembangunan Zona Integritas	Dokumen	-	-	1	-	1.00	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Yanlik	Kegiatan	-	-	1	-	1.00	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Penataan Organisasi	Persentase dokumen peningkatan Kinerja dan implementasi RB yang terselenggara	%		375,287,244	100	210,885,659	100	303,365,904	100	215,019,228	100	222,416,818	100	100	228,571,110	100	239,370,208

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Camat	Dokumen	-	-	146	-	146.00	-	146	-	146	-	146	146	-	146	-
	Jumlah Dokumen IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	73	-	73.00	-	73	-	73	-	73	73	-	73	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	375,287,244	1	210,885,659	1	303,365,904	1	215,019,228	1	222,416,818	1	1	228,571,110	1	239,370,208
	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/Bintek Akuntabilitas Kinerja kepada PD	Kegiatan	-	-	2	-	2.00	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-
	Jumlah pedoman penyusunan LKJIP Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	1	-	1.00	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	Dokumen laporan pengembangan aplikasi e SAKIP sesuai kebutuhan	Dokumen	-	-	1	-	1.00	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	Jumlah pemenuhan data e SAKIP Terintegrasi (perencanaan, persiapan penilaian dan perubahan)	Kegiatan	-	-	2	-	2.00	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi	%		3,194,502,612	100	7,539,296,785	100	6,858,228,225	100	7,153,511,616	100	7,375,270,476	100	100	7,603,903,861	100	7,839,624,880
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	1	2,379,982,318	1	5,612,459,906	1	5,602,255,000	1	5,325,270,815	1	5,490,354,210	1	1	5,660,555,191	1	5,836,032,402
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	343,403,472	1	307,202,795	1	282,573,225	1	291,483,254	1	300,519,235	1	1	309,835,331	1	319,440,226
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	40	471,116,822	12	1,619,634,084	12	973,400,000	12	1,536,757,547	12	1,584,397,031	12	12	1,633,513,339	12	1,684,152,252
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Akun Media Sosial dan Media Online	Laporan	-	-	12	-	12.00	-	12	-	12	-	12	12	-	12	-

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	N/A	2,135,823,671	AA	1,282,936,403	AA	1,269,109,994	AA	1,308,083,237	AA	1,353,086,947	AA	AA	1,390,526,978	AA	1,456,223,982
	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	N/A	1,226,570,386	100	792,712,950	100	784,169,755	100	1,096,501,094	100	1,270,634,115	100	100	1,342,929,213	100	1,449,453,733
	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	N/A	25,757,906,487	100	31,426,647,445	100	31,087,957,520	100	32,042,641,121	100	33,145,046,297	100	100	34,062,172,534	100	35,671,478,020
Administrasi Tata Pemerintahan	Rata-rata Penerapan SPM Kabupaten Bogor	%		1,226,570,386	98,50	792,712,950	98,50	784,169,755	98,50	1,096,501,094	98,50	1,270,634,115	98,50	98,50	1,342,929,213	98,50	1,449,453,733
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Fasilitas dan Pendampingan Penerapan SPM Kabupaten Bogor	Pendampingan	5	1,226,570,386	5	792,712,950	5	784,169,755	5	1,096,501,094	5	1,270,634,115	5	5	1,342,929,213	5	1,449,453,733
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Tata Pemerintahan	%		1,661,630,116	100	783,722,776	100	757,570,394	100	781,055,598	100	805,268,321	100	100	830,231,639	100	855,968,820
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	-	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	5	-	5	-
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Bantuan Infrastruktur Kelurahan	Dokumen	3	813,693,982	12	437,670,152	12	423,065,351	12	436,180,666	12	449,702,266	12	12	463,643,036	12	478,015,971
	Jumlah Kunjungan Kepala Daerah ke Kecamatan	Kunjungan	-	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	30	-	30	-
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	3	-	3	-
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	847,936,134	3	346,052,624	3	334,505,043	3	344,874,932	3	355,566,055	3	3	366,588,603	3	377,952,850



	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kapasitas Daerah	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat	%		22,869,705,985	100	29,850,211,719	100	29,564,126,501	100	30,118,454,140	100	31,196,646,592	100	100	31,831,987,778	100	33,327,948,717
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	9,704,535,496	5	10,338,799,366	5	9,854,274,050	5	10,303,614,209	5	10,623,026,249	5	5	10,952,340,063	5	11,291,862,605
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen	5	11,408,627,307	4	15,729,010,254	4	15,253,664,506	6	16,045,310,160	6	16,687,235,149	6	6	16,872,784,580	6	17,905,010,220
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	6	1,756,543,182	2	3,782,402,099	5	4,456,187,945	5	3,769,529,771	5	3,886,385,194	5	5	4,006,863,135	5	4,131,075,892
	Jumlah Pengkoordinasian Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	-	-	1	-	4.00	-	4	-	4	-	4	4	-	4	-
	Jumlah Kegiatan Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	-	-	3	-	3.00	-	3	-	3	-	3	3	-	3	-
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hibah Keagamaan	%		-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	-	100	-
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Laporan Penyelenggaraan Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	Laporan	-	-	181	-	160.00	-	160	-	160	-	160	160	-	160	-
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan Penyelenggaraan Hibah Lembaga Keagamaan	Laporan	-	-	10	-	8.00	-	7	-	8	-	8	7	-	8	-

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan sesuai Program Pembentukan Peraturan Bupati Peraturan Daerah	%		2,135,823,671	100	1,282,936,403	100	1,269,109,994	100	1,308,083,237	100	1,353,086,947	100	100	1,390,526,978	100	1,456,223,982
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	892	1,467,926,334	395	847,417,484	395	819,140,200	395	815,020,597	395	840,286,236	395	395	866,335,109	395	893,191,497
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	898	667,897,337	395	435,518,919	395	449,969,794	395	493,062,640	395	512,800,711	395	395	524,191,869	395	563,032,485
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tingkat Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi	Poin		-	>22.5	-	>22.5	-	>22.5	-	>22.5	-	>22.5	>22.5	-	>22.5	-
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Di Harmonisasi	Dokumen	-	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	15	-	15	-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Pusat yang Berkualitas	Poin		-	>22.5	-	>22.5	-	>22.5	-	>22.5	-	>22.5	>22.5	-	>22.5	-
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Asn Yang Mendapat Peningkatan Kompetensi Dibidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	2	-	4	-	6	-	8	-	8	10	-	12	-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Hasil Reviu	Poin		-	>27	-	>27	-	>27	-	>27	-	>27	>27	-	>27	-
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan di Reregulasi dan Deregulasi Sebagai Tindak Lanjut dari Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Dokumen	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	Poin		-	>18	-	>18	-	>18	-	>18	-	>18	>18	-	>18	-



Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Jdih Terintegrasi Sesuai Dengan Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Perkara yang Ditangani	%		933,619,886	100	506,396,325	100	489,498,350	100	796,688,267	100	796,688,267	100	100	980,756,946	100	1,026,444,695
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	36	933,619,886	35	506,396,325	35	489,498,350	35	796,688,267	35	796,688,267	35	35	980,756,946	35	1,026,444,695
	Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan	-	-	20	-	20.00	-	20	-	20	-	20	20	-	20	-
	Jumlah Penyuluhan Hukum Aparatur	Penyuluhan	-	-	1	-	1.00	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketercapaian Target Rencana Aksi Nasional HAM	%		-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	-	100	-
Fasilitasi Bantuan Hukum	Penyampaian Bukti Dukung Pemenuhan Rencana Aksi	Bukti Dukung	-	-	3	-	3.00	-	3	-	3	-	3	3	-	3	-
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Implementasi Kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati	%		292,950,500	80	286,316,625	80	276,762,275	80	346,443,116	80	346,443,116	80	80	419,196,171	80	461,115,788
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	340	219,130,000	110	170,597,550	110	164,904,825	110	206,423,036	110	206,423,036	110	110	249,771,873	110	274,749,060
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	-	-	12	65,724,075	12	48,326,325	12	79,526,131	12	79,526,131	12	12	96,226,618	12	105,849,280
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	25	73,820,500	1	49,995,000	1	63,531,125	1	60,493,950	1	60,493,950	1	1	73,197,680	1	80,517,447

Program Perekonomian dan Pembangunan	Indek Tata Kelola Pengadaan	Poin	N/A	5,771,666,999	79	4,474,769,107	80	5,125,988,750	81	4,562,479,051	82	4,719,448,025	82	83	4,850,035,551	84	5,079,180,912
	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	N/A	3,245,679,645	100	2,652,364,117	100	3,038,366,521	100	2,704,353,103	100	2,797,394,523	100	100	2,874,798,666	100	3,010,621,749
	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	N/A	1,610,342,044	100	2,066,619,009	100	2,367,377,073	100	2,107,126,805	100	2,179,621,063	100	100	2,239,931,363	100	2,345,759,428
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang perekonomian	%		405,132,676	100	1,277,243,848	100	1,186,603,876	100	1,196,132,171	100	1,233,212,268	100	100	1,271,441,848	100	1,310,856,546
Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	405,132,676	1	1,277,243,848	1	1,186,603,876	1	1,196,132,171	1	1,233,212,268	1	1	1,271,441,848	1	1,310,856,546
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Terhadap Pembinaan BUMD	%		379,378,050	100	167,848,300	100	384,019,225	100	193,708,781	100	206,887,080	100	100	206,042,627	100	248,820,141
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	-	379,378,050	1	167,848,300	1	384,019,225	1	193,708,781	1	206,887,080	1	1	206,042,627	1	248,820,141
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup perekonomian	%		325,831,318	100	139,781,509	100	257,503,243	100	161,317,724	100	166,318,574	100	100	171,474,450	100	176,790,158
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	1	325,831,318	1	139,781,509	1	257,503,243	1	161,317,724	1	166,318,574	1	1	171,474,450	1	176,790,158
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Dokumen Rumusan Kebijakan lingkup administrasi pembangunan	%		3,245,679,645	100	2,652,364,117	100	3,038,366,521	100	2,704,353,103	100	2,797,394,523	100	100	2,874,798,666	100	3,010,621,749
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	3	924,163,013	3	1,354,017,718	3	1,585,036,760	3	1,205,969,745	3	1,243,354,807	3	3	1,281,898,806	3	1,321,637,669



Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	608,866,948	5	473,323,715	2	529,824,243	2	546,248,966	2	572,389,158	2	2	580,818,134	2	645,527,821
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	1,712,649,684	3	825,022,684	3	923,505,518	3	952,134,392	3	981,650,558	3	3	1,012,081,726	3	1,043,456,259
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu dan akurat	%		-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	-	100	-
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kegiatan	Laporan	-	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	12	-	12	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Pengadaan Barang dan Jasa	%		5,771,666,999	100	4,474,769,107	100	5,125,988,750	100	4,562,479,051	100	4,719,448,025	100	100	4,850,035,551	100	5,079,180,912
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	851,901,862	1	783,111,562	1	993,657,964	1	903,766,000	1	947,314,870	1	1	960,966,269	1	1,069,550,482
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	1,547,002,926	4	980,126,588	4	1,097,124,076	4	1,131,135,242	4	1,166,200,434	4	4	1,202,352,648	4	1,239,625,580
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	110	3,372,762,211	110	2,711,530,957	110	3,035,206,710	110	2,527,577,808	110	2,605,932,720	110	110	2,686,716,634	110	2,770,004,850
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai		-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	40	-	40	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Penilaian Tingkat Kematangan UKPBJ yang terpenuhi	Variabel	-	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	9	-	9	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan PDN Dalam PBJ	%		-	87	-	87	-	87	-	87	-	87	87	-	88.2	-

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sosialisasi aturan Pengaturan PDN	Surat Edaran	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Sirup	Nilai		-	8.1	-	8	-	8.25	-	8.3	-	8.3	8.35	-	8.5	-
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan	%	-	-	81	-	82	-	82.05	-	82.1	-	82.1	82.15	-	82.2	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Tendering	Nilai		-	4.7	-	5	-	4.8	-	4.85	-	4.85	4.9	-	4.95	-
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Tender	%	-	-	92	-	93	-	93.05	-	93.1	-	93.1	93.15	-	93.2	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Katalog	Nilai		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Tereleksiannya Pengadaan secara e-Katalog	%	-	-	30	-	30	-	50	-	50.05	-	50.05	50.1	-	50.15	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen Toko Daring	Nilai		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan pada Toko Daring	Paket	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Non E-Tendering/Non E-Purchasing	Nilai		-	2.9	-	3	-	3.05	-	3.1	-	3.1	3.15	-	3.2	-
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengadaan secara Non e-Tender dan Non e-Purchasing di banding RUP	%	-	-	57	-	58	-	58.05	-	58.1	-	58.1	58.15	-	58.2	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Komponen E-Kontrak	Nilai		-	4	-	4	-	4.15	-	4.2	-	4.2	4.25	-	4.3	-



Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Kontrak yang Terupload pada Sistem	%	-	-	80	-	81	-	81.05	-	81.1	-	81.1	81.15	-	81.2	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kualifikasi Dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai		-	21.2	-	22	-	22.9	-	23.4	-	23.4	23.9	-	24.4	-
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM PBJ yang terqualifikasi dan berkompentensi	Orang	-	-	54	-	54	-	65	-	65	-	65	65	-	65	-
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan lingkup Sumber Daya Alam	%		500,000,000	100	481,745,352	100	539,250,729	100	555,968,129	100	573,203,141	100	100	590,972,438	100	609,292,583
Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	188,455,846	1	322,988,243	1	361,543,236	1	372,751,223	1	384,306,511	1	1	396,220,012	1	408,502,833
Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	187,503,834	1	96,270,734	1	107,762,368	1	111,103,220	1	114,547,420	1	1	118,098,390	1	121,759,440
Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	124,040,320	1	62,486,375	1	69,945,125	1	72,113,686	1	74,349,210	1	1	76,654,036	1	79,030,311



Perincian program, kegiatan, dan sub kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada analisis kebutuhan strategis daerah. Sub kegiatan merupakan unit pelaksanaan teknis paling operasional dalam sistem perencanaan dan penganggaran, yang bertujuan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan serta mendorong efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sub kegiatan diposisikan sebagai instrumen utama dalam mengintegrasikan kebijakan lintas urusan pemerintahan dengan tujuan pembangunan jangka menengah.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025–2030, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis melalui pelaksanaan sub kegiatan yang bersifat mendukung, memfasilitasi, dan mengoordinasikan tugas-tugas pemerintahan secara lintas sektor. Sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dirancang untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung sasaran strategis pembangunan. Sub kegiatan tersebut mencerminkan fungsi utama Sekretariat Daerah sebagai penggerak koordinasi, pelaksana administrasi pemerintahan, penyusun kebijakan, serta fasilitator hubungan kerja antarperangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat dan lembaga eksternal lainnya.

Sub kegiatan prioritas yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif, namun juga memiliki nilai strategis dalam mendorong reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, efektivitas penyusunan kebijakan daerah, serta penguatan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan. Dalam pelaksanaannya, setiap sub kegiatan dikaitkan secara langsung dengan indikator kinerja yang terukur, kelompok sasaran yang jelas, serta pendanaan indikatif yang dialokasikan secara efisien dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, setiap sub kegiatan prioritas disertai dengan indikator kinerja yang terukur (output), kelompok sasaran yang jelas, serta alokasi pendanaan indikatif yang rasional dan berbasis kebutuhan riil. Secara ringkas sub kegiatan prioritas Sekretariat Daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 -2029

Urusan / Unsur : Penunjang
 Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
 Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Penataan Organisasi	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
		Tercapainya Pengorganisasian dan evaluasi Perangkat Daerah lingkup Administrasi Umum	Penataan Organisasi	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Penataan Organisasi	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Penataan Organisasi	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tercapainya Indeks Reformasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	

			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
		Tercapainya Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Administrasi Tata Pemerintahan	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	

			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	

			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Tercapainya Pengorganisasian dan Evaluasi Perangkat Daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. IKU mencerminkan kinerja esensial organisasi perangkat daerah dan berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara menyeluruh.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap kinerjanya sendiri, tetapi juga berperan dalam memastikan peningkatan kinerja perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, perumusan IKU Sekretariat Daerah mempertimbangkan posisi strategis tersebut, serta memperkuat peran Sekretariat Daerah dalam mendorong kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Selaras dengan tujuan strategis Sekretariat Daerah adalah "Meningkatnya Kualitas kebijakan dan koordinasi dalam mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara akuntabel". Untuk mengukur tingkat pencapaian terhadap tujuan tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama yaitu Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik. Indikator ini menunjukkan proporsi perangkat daerah yang mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing dengan kualitas capaian minimal pada kategori "Baik". Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin efektif peran koordinasi dan pembinaan Sekretariat Daerah terhadap perangkat daerah lainnya dalam meraih hasil kinerja yang terstandar.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat Daerah juga menetapkan indikator-indikator sasaran strategis yang lebih operasional, yakni Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Minimal Baik. Indikator ini mengukur proporsi perangkat daerah yang memperoleh penilaian *minimal Baik* dalam evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan fasilitasi dan koordinasi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Indikator sasaran strategis selanjutnya yaitu Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Sekretariat Daerah. Indikator ini mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi yang menjadi kewenangan umum (*general*) Sekretariat Daerah, seperti

penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Kinerja pada indikator ini mencerminkan kapabilitas internal Sekretariat Daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara struktural dan berkelanjutan.

Seluruh indikator tersebut menjadi bagian integral dari sistem manajemen kinerja Sekretariat Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengukuran capaian, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, perencanaan penganggaran, dan peningkatan kualitas layanan internal pemerintahan. IKU yang ditetapkan juga sejalan dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat kabupaten. Dengan perumusan indikator yang tepat, terukur, dan relevan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor diharapkan mampu menjalankan perannya secara lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Gambaran ringkasnya tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	%	100	100	100	100	100	100
1.1	Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	%	100	100	100	100	100	100

Indikator utama tersebut kemudian diturunkan secara lebih operasional ke dalam level Indikator program, yang menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi kinerja lintas urusan dan menjadi Indikator Kinerja Kunci Kegiatan. Rangkaian indikator tidak hanya menjadi alat ukur pencapaian kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman perumusan program dan kegiatan strategis Sekretariat Daerah selama periode 2025–2030, Informasi tersebut disajikan secara lebih terstruktur pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

Urusan / Unsur : Penunjang
Bidang Urusan : Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
1	Persentase Ketercapaian IKU PD Minimal Baik	%	100	100	100	100	100	100	
1.1	Persentase Ketercapaian RB General Kewenangan Setda	%	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Kematangan Kelembagaan	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Administrasi Umum	%	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA	AA	
	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	
	Indek Tata Kelola Pengadaan	Poin	79	80	81	82	83	84	
	Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Minimal Baik Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kebijakan dan Koordinasi Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Demikian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan bidang urusan pendidikan, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.



TERIMA KASIH

